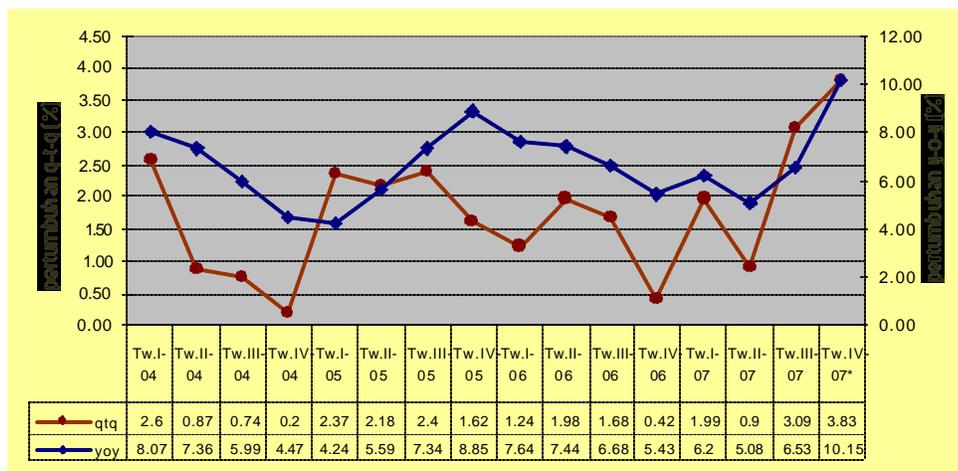


BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

1.1. KONDISI UMUM

Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) selama tahun 2007 mulai menunjukkan tren ekspansi ekonomi dengan stabilitas makro regional yang tetap terjaga. Meski sempat mengalami perlambatan pada triwulan II 2007, perekonomian pada triwulan III 2007 tumbuh 3.09% (qtq) atau 6.53% (yoy) dan lebih berakselerasi memasuki triwulan IV 2007. Data sementara BPS memperlihatkan pertumbuhan pada triwulan IV 2007 sebesar 3.83% (qtq) atau 10.15 (yoy), sehingga pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2007 tercatat sebesar 7.01%.

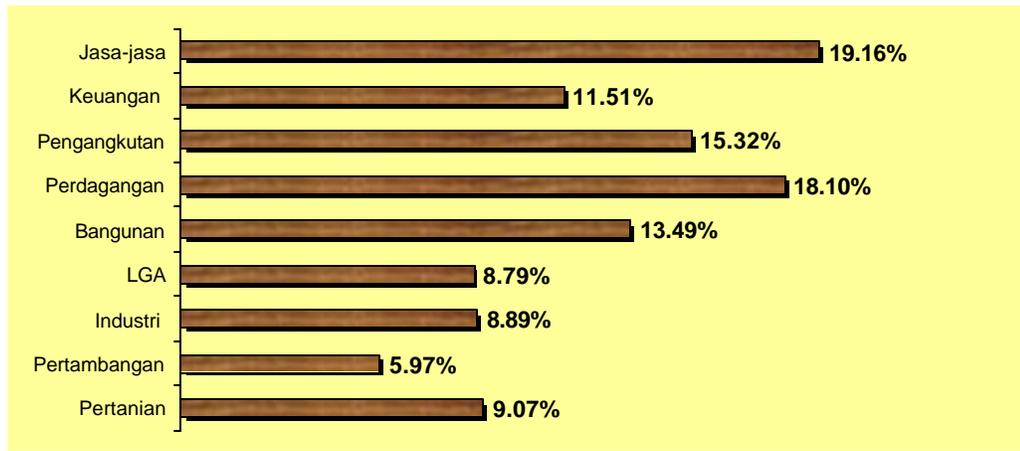
GRAFIK 1.1 – PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Sumber : BPS
*) angka sementara

Membayaknya indikator ekonomi antara lain diperlihatkan oleh pergerakan IHK yang stabil, pertumbuhan investasi domestik dan asing serta perkembangan positif di sektor keuangan wilayah provinsi Kepulauan Riau. Kondisi perekonomian dan inflasi Kepri pada triwulan IV 2007 tidak terlalu dipengaruhi oleh perlambatan perekonomian dunia, khususnya regional Asia sebagai dampak dari melemahnya nilai tukar AS, *krisis sub-prime mortgage* dan gejolak harga minyak dunia. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya nilai ekspor dibandingkan tahun sebelumnya.

GRAFIK 1.2 – LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN PDRB TRIWULAN IV 2007 (y-o-y)



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Jasa-jasa diikuti oleh sektor Perdagangan, Pengangkutan, Bangunan dan sektor Keuangan dengan tingkat pertumbuhan tahunan (yoy) di atas 10%. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut disebabkan karena meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa-jasa serta pariwisata menyambut berlakunya kembali kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun, serta ditetapkannya Batam sebagai salah satu dari 12 destinasi MICE (*Meetings, Incentive, Convention & Exhibition*), di samping tingginya permintaan menyambut hari perayaan Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang mengakselerasi perekonomian pada triwulan IV 2007.

Pertumbuhan sektor Jasa-jasa sebagian besar dihasilkan dari penerimaan Pemerintahan Umum antara lain terkait pajak dan retribusi daerah yang meningkat sebesar 24,17% dibandingkan triwulan IV 2006. Selanjutnya diikuti oleh penambahan *output* pada sub-sektor Hiburan dan Rekreasi (22,25%), Sosial Kemasyarakatan (15,26%) dan jasa Perorangan/Rumah Tangga (13,02%).

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang meningkat 18,10% (yoy) dihasilkan dari pertumbuhan sub-sektor Perdagangan Besar & Eceran (17,13%), sub-sektor Hotel (23,30%), dan sub-sektor Restoran (24,37%). Aktivitas perdagangan dari dan ke wilayah Kepulauan Riau yang meningkat memberi kontribusi besar terhadap sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mengalami pertumbuhan (yoy) 15,32%, dimana sub-sektor Pengangkutan tumbuh 14,85% dan sub-sektor Komunikasi naik 18,68%.

Meningkatnya aktivitas perekonomian menjelang era FTZ yang didukung oleh stabilitas sosial, politik dan keamanan telah memberi peluang besar terhadap bangkitnya investasi domestik dan asing, terutama pada industri properti dan galangan kapal (*shipyard*).

Perkembangan properti di wilayah Kepulauan Riau khususnya kota Batam sepanjang tahun 2007 dapat dikatakan sebagai tahun bangkitnya industri properti setelah mengalami kelesuan sejak dicabutnya status kawasan bebas pada tahun 2004. Hal ini menstimulus pertumbuhan sektor Bangunan dengan peningkatan sebesar 13,49%.

Sementara itu, *booming* industri galangan kapal di Batam ditandai dengan peluncuran kapal MV United Ocean jenis Bulk Carrier DWT 10.000 ton pada bulan November 2007 dengan biaya US\$8,5 juta yang dikerjakan 100 orang insinyur Indonesia dan 6 ekspatriat. Banyak kalangan memprediksi bahwa Batam, Bintan dan Karimun akan menjelma menjadi pusat perkapalan Nasional. Ekspektasi ini diperkuat dengan dibangunnya 3 industri galangan kapal selama bulan November 2007, dimana 2 perusahaan berlokasi di Karimun dan 1 perusahaan di Batam. Kedua industri tersebut di atas masih sangat berpotensi menjadi industri andalan provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun mendatang.

Peran perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Meningkatnya peran serta perbankan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan perkembangan sektor riil tercermin dari penguatan berbagai indikator utama antara lain jaringan kantor, dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan. Sub-sektor Perbankan yang meningkat 12,52% (yoy) menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan sektor Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan.

Berdasarkan hasil survey Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Kota Batam pada triwulan IV 2007 diketahui bahwa IHPR kota Batam meningkat sebesar 0,20% menjadi 100,20. Harga perumahan sederhana naik tajam yang ditunjukkan dengan peningkatan indeks sebesar 10,13. Peningkatan indeks disebabkan oleh meningkatnya permintaan pada tipe rumah sederhana yang sekaligus mampu menunjukkan perbaikan tingkat pendapatan terutama masyarakat kecil.

BOKS - I

Survei Harga Properti Residensial di Kota Batam Triwulan IV–2007

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) merupakan survei rutin triwulanan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan harga properti residensial, baik pada triwulan bersangkutan maupun perkiraan triwulan berikutnya. Survei dilakukan terhadap pengembang di wilayah Jabotabek dan 13 Kantor Bank Indonesia, dimana jumlah responden mencakup 40 pengembang utama di Jabotabek dan sekitar 215 pengembang di KBI. Hasil survey ini diolah menjadi Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) gabungan/komposit. Survey Harga Properti Residensial dilakukan sejak triwulan I 1999 untuk Jabotabek dan 12 KBI, dan Pontianak sejak triwulan I 2004. Sementara itu, KBI Batam melakukan survei IHPR sejak triwulan I 2005.

Ruang lingkup Survey Harga Properti Residensial (SHPR) meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual oleh perusahaan pengembang perumahan

(*primary market*) yang melakukan transaksi penjualan. Informasi yang diperoleh dari hasil survey disamping digunakan untuk melihat perkembangan harga dan kuantitas properti residensial yang terjadi pada triwulan berjalan, juga mampu mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha property serta perkiraan harga properti residensial di triwulan mendatang. Pengolahan data hasil survei menggunakan metode indeks berantai sederhana (*chain index*), dengan membandingkan harga dan kuantitas properti triwulan berjalan dengan periode sebelumnya yang disajikan dalam bentuk Indeks Harga Properti Residensial (IHPR). Selain sebagai sarana untuk memonitor perkembangan harga properti residensial, data IHPR juga merupakan data yang dapat digunakan sebagai data pembandingan dalam mengetahui inflasi harga aset di kota Batam.

Penelitian SHPR pada triwulan IV 2007 sebenarnya mengirimkan 59 kuisisioner data perkembangan harga proyek, namun Tim Peneliti memilih 55 data proyek yang cukup lengkap, valid dan representatif untuk dimasukkan ke dalam perhitungan Indeks Harga Properti Residensial untuk triwulan IV-2007. Dengan demikian SHPR triwulan IV-2007 menggunakan sampel sebanyak 55 proyek dari 21 perusahaan/developer. Lokasi proyek meliputi Batam Centre, Batu Ampar, Sekupang, Muka Kuning, Tanjung Uncang, Nongsa, Kabil dan Duriangkang.

Hasil IHPR pada triwulan IV 2007 berdasarkan klasifikasi rumah memperlihatkan bahwa hanya indeks perumahan sederhana yang mengalami kenaikan sebesar 10,13 poin dibanding triwulan III 2007. Keadaan ini memberi indikasi bahwa terjadi kenaikan permintaan untuk perumahan sederhana yang dimungkinkan oleh adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kalangan berpendapatan rendah. Sedangkan penurunan harga-harga tipe menengah dan besar terjadi demi mencari titik keseimbangan baru karena harganya sempat naik pada triwulan III 2007, di samping terjadinya penurunan permintaan untuk perumahan tipe tersebut. Namun demikian, penurunan harga ini diimbangi oleh kenaikan kurs Dolar Singapura menjadi 6400 pada triwulan ini dibandingkan 6200 pada triwulan sebelumnya.

NO	Klasifikasi Rumah	Harga Rata-Rata		IHPR		Naik (Turun)
		Tw.III-2007	Tw.IV-2007	Tw.III-2007	Tw.IV-2007	
1.	Sederhana	Rp73.466.779	Rp80.909.290	100,61	110,13	10,13
2.	Menengah	Rp86.770.638	Rp180.555.912	100,82	96,67	(3,33)
3.	Besar	Rp648.839.504	Rp614.108.679	100,53	94,65	(5,35)
				100,69	100,20	0,20

Sumber : Laporan SHPR – Data Diolah, 2007

Berdasarkan hasil survei juga diketahui bahwa tipe rumah yang dikembangkan oleh developer masih didominasi oleh tipe menengah (48,72%), menyusul tipe menengah (29,49%) dan tipe besar/mewah (21,79%). Melalui data-data historis pada survei periode sebelumnya serta hasil perhitungan IHPR pada survei triwulan sekarang dengan menggunakan analisa trend (persamaan regresi sederhana) maka dapat diperkirakan tingkat pertumbuhan IHPR Kota Batam pada triwulan I-2008 yakni sebesar 100,54 (naik 0,54%).

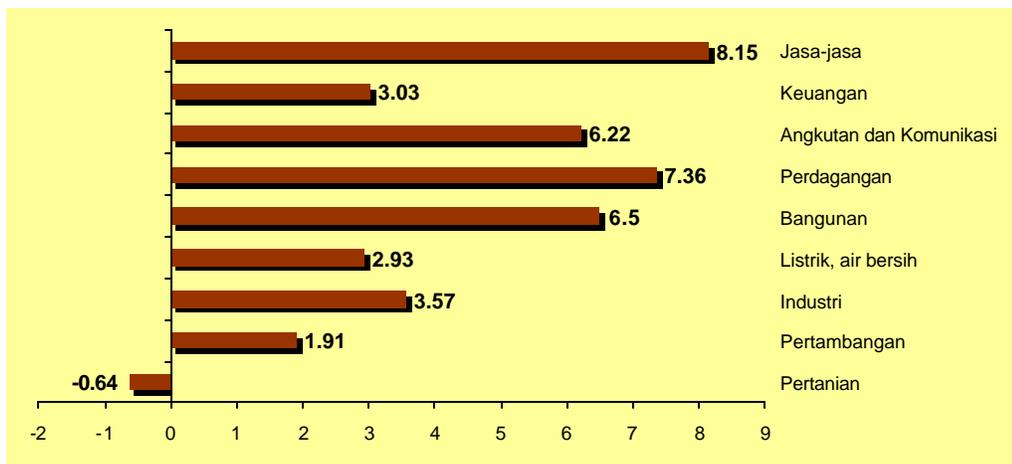
Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan properti di Batam, antara lain yang paling banyak menimpa responden pada periode ini adalah tinggi harga bahan bangunan (84,55%), disusul oleh masalah tingginya BPHTB (77%) dan layanan ATB yang tidak kunjung membaik (76,36%). Sedangkan yang permasalahan yang paling sedikit mempengaruhi produktifitas/penjualan respon adalah keluhan customer tentang kejelasan PPN (39%), dan perputaran pekerja kontrak di Batam (54,55%).

Adapun permasalahan yang paling jarang dialami developer adalah keluhan customer tentang kejelasan ada/tidaknya PPN. Hal ini merupakan respon positif bidang properti terhadap harapan diberlakukannya seluruh wilayah BBK sebagai wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sehingga PP 63 Tahun 2003 tentang PPN dan PPNBM menjadi tidak berlaku lagi (Ismeth Abdullah, Batam Pos 12 Juni 2007).

Terkait dengan perkembangan sektor properti di Kota Batam, Bank Indonesia melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait antara lain REI, developer serta perbankan, terutama mengingat kecenderungan developer di Kota Batam umumnya belum memanfaatkan peran perbankan dalam pembiayaan usahanya.

Tinjauan triwulanan (qtq) terhadap PDRB Provinsi Kepri triwulan IV 2007 memperlihatkan tingkat akselerasi yang signifikan terhadap triwulan III 2007, dengan pertumbuhan 10,15%. Pertumbuhan tertinggi tetap terjadi pada sektor jasa-jasa (8,15%), yang diikuti oleh sektor Perdagangan (7,36%), sektor Bangunan (6,50%) dan sektor Angkutan dan komunikasi (6,22%).

GRAFIK 1.3 – LAJU PERTUMBUHAN TRIWULANAN PDRB TRIWULAN IV 2007



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dibandingkan dengan triwulan III 2007 (qtq), peningkatan *output* sektor Jasa-jasa sebagian besar didorong oleh sub-sektor Hiburan dan Rekreasi yang tumbuh 10,77% dan jasa Pemerintahan Umum (9,89%). Sub-sektor Perdagangan Besar & Eceran yang meningkat 7,42% memberi kontribusi terbesar bagi pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Tingginya aktivitas masyarakat masuk dan keluar dari provinsi Kepulauan Riau melalui laut dan udara mendorong pertumbuhan sub-sektor Pengangkutan sebesar 6,22%.

Sedangkan sektor pertanian tercatat sebagai satu-satunya sektor yang mengalami perlambatan (qtq) memasuki triwulan IV 2007 sebesar -0,64%. Faktor buruknya cuaca memasuki musim barat di akhir tahun, selain menyebabkan terkendalanya distribusi dan panen beberapa daerah penyuplai bahan makanan, juga mengganggu aktivitas melaut para nelayan karena tingginya ombak. Keadaan ini sangat merugikan bagi provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan dimana sebagian besar kebutuhan bahan makanan dipasok dari daerah lain. Meski demikian, sub-sektor Peternakan dan Hasil-hasilnya mampu mencatat pertumbuhan sebesar 8,44% yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pada perayaan-perayaan besar di akhir tahun, terutama pada Hari Raya Idul Adha pada bulan Desember 2007.

Keadaan tersebut cukup sejalan dengan asesmen yang dilakukan KBI Batam terhadap PDRB triwulan IV 2007. Meskipun masih terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya terjadi pada triwulan IV 2007 dimana hasil kajian memperkirakan terjadi penurunan output pada

sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Retoran, serta sektor Jasa jasa, namun sektor pertanian mencatat penurunan paling tinggi dibandingkan triwulan III 2007.

BOKS - II

Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV 2007

Otonomi daerah telah memberikan momentum bagi daerah untuk mengoptimalkan pembangunan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah telah banyak melakukan terobosan terkait dengan sumber dana pembangunan maupun prioritas pembangunan. Berbagai upaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan lapangan kerja baru.

Kemajuan perekonomian daerah memberi peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hasil pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator keberhasilan pemerintah dalam mengatasi segala permasalahan ekonomi, namun dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

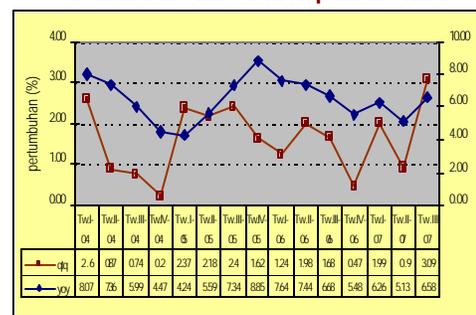
Usaha untuk mendapatkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi perlu terus dikembangkan. Metode proyeksi pada umumnya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, misalnya *Time-Series Methods*, MODFI dan *Business Cycle Analysis*, dimana tidak ada satupun metode terbaik yang secara mutlak dapat menghasilkan angka proyeksi yang akurat. Asesmen ini menggunakan *time-series methods* dengan pendekatan dekomposisi terhadap 17 sektor dalam komponen PDRB disertai analisa terhadap perkembangan makro ekonomi regional terkini dan asumsi-asumsi guna mendukung akurasi hasil penelitian.

Kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Oktober 2007 menunjukkan ekspansi ekonomi yang terus berlanjut dengan stabilitas makro ekonomi regional yang tetap terjaga. Meski sempat mengalami perlambatan pada triwulan II 2007, perekonomian pada triwulan III 2007 tumbuh 3.09% (qtq) dibandingkan triwulan II 2007 atau meningkat 6.58% (yoy) terhadap triwulan III 2006. Membaiknya indikator ekonomi regional antara lain diperlihatkan dari pergerakan IHK yang stabil, pertumbuhan investasi domestik dan asing, serta penguatan sektor keuangan.

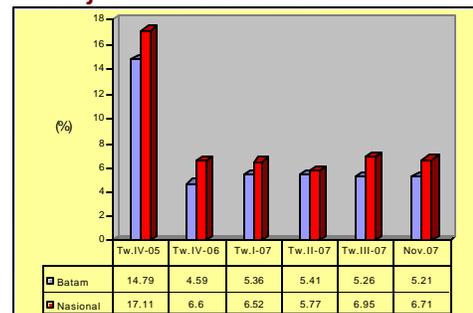
Laju inflasi prov. Kepri yang diwakili kota Batam pada posisi November 2007 sebesar 5.21% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi Nasional sebesar 6.71% (yoy). Pergerakan inflasi sepanjang tahun 2007 relatif stabil dan sudah tidak dipengaruhi oleh dampak kenaikan BBM tahun 2005. Sementara itu, perkembangan makro Nasional masih positif ditandai dengan terjaganya tingkat inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah, serta tren penurunan suku bunga ditengah tekanan kondisi internasional antara lain melemahnya mata uang USD, krisis *subprime mortgage* serta pelonjakan harga minyak dunia yang hampir menyentuh level psikologis US\$100/brl.

Dari sisi penawaran, realisasi investasi selama periode Januari - September 2007 sebesar US\$ 206 juta, yang didominasi oleh investasi sektor industri khusus logam, *shipyard* dan perdagangan besar. Optimisme FTZ disambut penandatanganan nota kesepahaman antara 22 PMA dengan kepala daerah Batam-Bintan-Karimun (BBK) dengan total investasi mencapai US\$ 1,9 miliar.

Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau



Laju Inflasi Kota Batam dan Nasional



Sumber : BPS

Indikator di sektor perbankan menunjukkan perkembangan yang positif selama Januari - Oktober 2007 (ytd). Hal ini diperlihatkan dari penambahan jaringan kantor sebanyak 14 kantor menjadi 181 kantor di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Di samping itu, total aset perbankan juga meningkat sebesar Rp1,8 triliun (11.94%) menjadi Rp16.81 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh Rp1.5 triliun (11.92%) menjadi Rp14.3 triliun. Peningkatan DPK sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi *saving base* yang diperlihatkan dari peningkatan jumlah rekening dan aktivitas transaksi, serta penambahan jaringan kantor bank dan ATM.

Kredit yang disalurkan juga tumbuh Rp1.3 triliun (19,38%) menjadi Rp8.2 triliun pada posisi Oktober 2007, lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun 2006 (yoy) sebesar Rp902 milyar (15.05%). Relatif kecilnya NPL Perbankan yakni 3.39% disebabkan di samping pengaruh pertumbuhan kredit juga upaya yang dilakukan perbankan dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi dan penagihan secara intensif. Peluang akselerasi intermediasi cukup terbuka berdasarkan rasio LDR Perbankan sebesar

57.59%, meningkat dibandingkan posisi LDR Desember 2006 sebesar 53,67%. Namun jika dihitung dengan penyaluran kredit korporasi yang pencatatannya dilakukan di pusat, tingkat LDR perbankan Kepri mencapai lebih dari 70%. Membaiknya seluruh indikator perbankan pada akhirnya menghasilkan peningkatan laba sebesar Rp61 miliar (35.67%) menjadi Rp232 miliar pada Oktober 2007.

Asesmen pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2007 akan didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan pertumbuhan (qtq) masing-masing sebesar 4.78%, 2.32% dan 5.11%. Di samping itu, sektor pertambangan dan keuangan diprediksi masih akan bergerak positif sejalan dengan tumbuhnya aktivitas perekonomian. Sedangkan industri pertanian menunjukkan perlambatan yang diduga akibat pengaruh musim hujan di akhir tahun. Selain menyebabkan kendala dan kerugian panen beberapa daerah penyuplai bahan makanan, juga mengganggu distribusi dan aktivitas melaut para nelayan karena tingginya ombak.

Kembalinya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kepulauan Riau, khususnya BBK, akan memberikan *multiplier effect* positif pada seluruh sendi perekonomian, terlebih pada sektor industri pengolahan, bangunan dan perdagangan. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi selain disebabkan oleh meningkatnya aktivitas lalu lintas barang dan modal dari dan ke wilayah provinsi Kepulauan Riau, juga akan dipengaruhi oleh lonjakan penumpang menyambut perayaan Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Asesmen tersebut juga didukung oleh hasil estimasi PDRB triwulan IV 2007 yang diperoleh dengan menggunakan metode dekomposisi.

Dengan diketahuinya PDRB triwulan IV 2006 sebesar Rp8,243,348.17 milyar, maka akan diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau triwulan IV 2007 sebesar 9.09% (yoy) atau tumbuh 2,84% (qtq) dibandingkan triwulan III 2007. Jika asumsi berlanjutnya pertumbuhan investasi dan sektor perbankan, tingkat inflasi tetap terjaga, serta komitmen tegas pemerintah daerah dalam menindak segala bentuk praktik birokrasi yang tidak pro-investasi dapat terpenuhi, maka estimasi pertumbuhan di triwulan IV 2007 optimis tercapai bahkan melebihi angka proyeksi. Secara kumulatif, perekonomian Kepulauan Riau tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 6,78% dibandingkan tahun 2006.

Perkembangan Indikator Perbankan

(milyar)

Indikator	Tw.I-07	Tw.II-07	Tw.III-07	Okt-07
Total Asset	15,076	15,605	16,438	16,814
DPK	12,833	13,206	13,956	14,300
Kredit	6,979	7,535	8,071	8,236
LABA	45	112	194	232
NPL	4.46%	4.28%	3.47%	3.39%
LDR	53.87%	56.50%	57.24%	57.59%

Sumber : Bank Indonesia

Pertumbuhan Sektoral Tw-III & Estimasi Tw-IV

(juta)

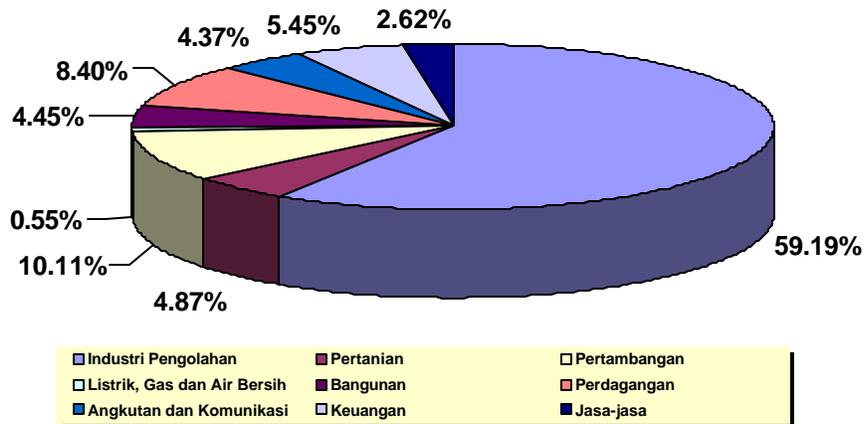
Sektor	Tw.III-2007	Tw.IV-2007*
Tanaman Bahan Makanan	21,012.78	15,153.93
Perkebunan	22,053.43	21,041.35
Peternakan	62,985.47	64,328.45
Kehutanan	5,068.23	5,925.08
Perikanan	307,634.86	303,261.30
Minyak & Gas Bumi	479,573.35	444,462.40
Pertambangan Tanpa Migas	50,421.42	56,366.73
Penggalian	34,255.32	37,250.52
Industri Tanpa Migas	5,836,216.85	6,115,292.72
Listrik, Gas & Air Bersih	20,245.66	20,909.19
Bangunan	241,640.98	247,241.98
Perdagangan	616,645.77	599,133.93
Hotel	75,665.61	72,488.75
Restoran	38,376.48	35,980.17
Pengangkutan & Komunikasi	354,865.37	373,000.79
Keuangan, Sewa & Jasa Prshn	400,585.96	407,455.71
Jasa-jasa	177,272.52	173,187.62
P D R B	8,744,520.06	8,992,480.58

*) hasil estimasi

1.2. SEKTOR EKONOMI DOMINAN

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2007 tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Sektor Industri Pengolahan masih menjadi sumber utama bagi perekonomian Kepulauan Riau dengan *share* sebesar 59,19%. Meski kontribusi sektor ini menurun dibanding triwulan III 2007, namun laju pertumbuhan terus meningkat sebagai hasil dari perkembangan industri *shipyard* dan industri logam khusus. Kemudian diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian (10,11%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,40%), serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5,45%).

GRAFIK 1.4 – SUMBANGAN EKONOMI SEKTORAL TRIWULAN IV 2007



Sektor yang mengalami peningkatan sumbangan ekonomi dibandingkan triwulan III 2007 adalah sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa-jasa. Meskipun sektor Jasa-jasa hanya memiliki *share* sebesar 2,62% terhadap PDRB triwulan IV 2007, namun ke depan diperkirakan akan semakin berkontribusi sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian provinsi Kepulauan Riau menjelang diimplementasikannya FTZ di wilayah Batam, Bintan dan Karimun.

Sedangkan penurunan kontribusi terbesar terjadi pada sektor Pertanian dari 5,07% pada triwulan III 2007 menjadi 4,87% di triwulan IV 2007, yang didominasi oleh penurunan sub-sektor Perikanan dan sekaligus menjadi penyebab utama melambatnya laju pertumbuhan sektor ini di triwulan akhir tahun 2007. Peningkatan kontribusi hanya diberikan oleh sub-sektor Peternakan dan hasil-hasilnya.

Keberadaan ekonomi suatu Kabupaten/Kota salah satunya dapat dilihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan dalam suatu provinsi. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kota Batam merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau, diikuti oleh Tanjung Pinang, Karimun, Bintan, Natuna dan Lingga. Dalam perkembangannya terjadi pergeseran kontribusi terhadap PDRB, dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi Kabupaten Bintan terus mengalami penurunan, sedangkan kontribusi Kabupaten Karimun meningkat menjadi lebih besar dari kontribusi Kabupaten Bintan.

1.2.1. PDRB Sisi Penawaran / Produksi

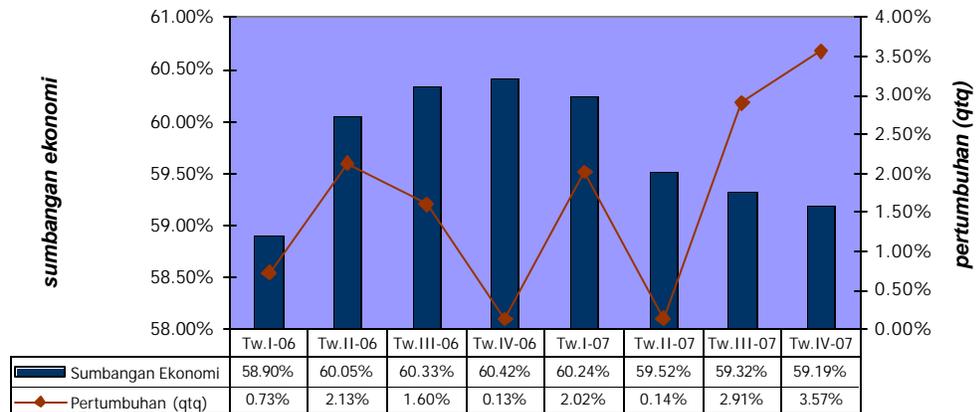
Seperti yang dibahas sebelumnya, struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2007 tetap didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 59,19%, diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian (10,11%), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,40%), serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (5,45%). Sedangkan sektor lainnya memberikan sumbangan ekonomi di bawah 5%.

Sektor Industri Pengolahan sebagian besar berdomisili di Kota Batam, kemudian menyusul Kabupaten Bintan dan terakhir kabupaten Karimun yang mulai berkembang dengan industri galangan kapal (*shipyard*). Adapun sektor Pertambangan dan Penggalian sebagian berada di kabupaten Bintan, namun masih bertumpu pada pertambangan migas di Kabupaten Natuna. Sementara itu sektor perdagangan merupakan sektor unggulan di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, serta sektor pertanian menjadi sektor andalan Kabupaten Lingga.

1.2.1.1. Komponen Industri Pengolahan

Wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang berada di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 6 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Berdasarkan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau, komponen industri memiliki nilai dan kontribusi terbesar baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan 2000. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi provinsi Provinsi Kepulauan Riau.

GRAFIK 1.5 – LAJU PERTUMBUHAN & KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PERIODE TW.I-2006 s/d. TW.IV-2007



Sesuai dengan rencana pengembangan awalnya kota Batam sebagai daerah industri dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, menjadikan sektor Industri Pengolahan dan perdagangan sekaligus menjadi penggerak ekonomi utama provinsi Kepulauan Riau. Setelah sempat mengalami penurunan sejak triwulan IV 2007 pasca ditariknya status khusus Batam sebagai wilayah perdagangan bebas, sektor Industri Pengolahan mulai berakselerasi memasuki semester ke II tahun 2007. Meski demikian, sumbangan ekonomi yang diberikan oleh sektor ini masih menunjukkan tren penurunan. Pada grafik 1.5 terlihat bahwa *share* industri pengolahan periode triwulan IV 2007 sebesar 59,19%, turun dibandingkan *share* triwulan III 2007 yang tercatat sebesar 59,32%. Hal ini memberi indikasi bahwa sektor Industri Pengolahan masih belum pulih dan stabil, meski mulai menunjukkan peningkatan dibanding triwulan-triwulan sebelumnya.

Menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara beberapa PMA dengan pemerintah Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, mulai tampak beberapa realisasi terutama pada industri galangan kapal (*shipyard*) yang diprediksi akan menjadi industri andalan provinsi Kepulauan Riau. Antara lain terealisasi pembangunan 3 industri industri galangan kapal selama bulan November 2007, dimana 2 perusahaan berlokasi di Karimun dan 1 perusahaan di Batam.

Sebagaimana diuraikan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melakukan beberapa upaya peningkatan sarana infrastruktur di wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2007, diantaranya adalah: pembangunan jalan baru sepanjang 80 km², jembatan

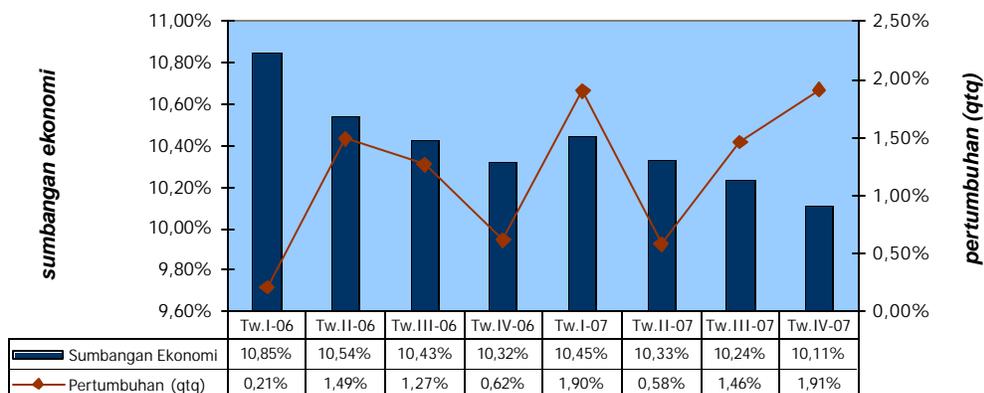
sepanjang 748 m² dan lokasinya menyebar di seluruh Kab/Kota. Di samping pembangunan jalan dan jembatan, juga telah dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 279 km² dan pada tahun 2007 akan ditambah sebanyak 332 km². Selain itu, untuk peningkatan jalan dari jalan tanah menjadi jalan aspal sampai dengan tahun 2006 telah dilakukan sepanjang 21 km² dan pada tahun 2007 akan ditambah sepanjang 20 km². Diharapkan melalui pembangunan jalan dan jembatan tersebut dapat meminimalisasi keterisolasian daerah terpencil dan meningkatkan pelayanan transportasi darat antara beberapa daerah seperti di Lingga dan Natuna.

Adapun rencana pengembangan perekonomian untuk Kab. Karimun pada tahun 2007 terkait dengan sektor industri adalah rencana reklamasi beberapa wilayah yang diperuntukan untuk kawasan industri *shipyard*, antara lain di Pulau Baran-Pulau Kera, Tg. Buluh Kasap-Tg. Tiram, Tg. Pengaru-Parit Rampak, dan Tg. Sebatok.

1.2.1.2. Komponen Pertambangan

Sumbangan ekonomi dari sektor pertambangan terhadap PDRB sepanjang tahun 2007 terus mengalami tren penurunan dimana pada triwulan IV 2007 sebesar 10,11%, turun dibandingkan kontribusinya pada triwulan III 2007 sebesar 10,24%. Keadaan ini diduga terkait dengan larangan ekspor pasir ke Singapura oleh Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2007 dan penertiban beberapa areal tambang yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Tetapi jika dilihat dari outputnya, PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian naik memasuki semester ke II tahun 2007, dengan laju pertumbuhan 1,46 pada triwulan III 2007 menjadi 1,91% pada triwulan IV 2007.

GRAFIK 1.6 – LAJU PERTUMBUHAN & KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN & PENGGALIAN TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PERIODE TW.I-2006 s/d. TW.IV-2007



Adapun daerah yang memberikan kontribusi migas terbesar untuk PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Natuna. Di daerah tersebut terdapat kekayaan alam minyak dan gas, baik di sebelah barat dimana ada perusahaan Conoco Philips, Star Energy, Primer Oil maupun di sebelah timur yang sarat akan gas alam. Selain mengandung potensi gas yang cukup besar, di sebelah timur juga ada kavling PT Caltex dan Exxon yang melakukan eksplorasi minyak.

Berdasarkan data Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan yang dirilis oleh BPS, jenis bahan tambang/galian bauksit dihasilkan oleh kabupaten Bintan, Karimun dan kota Tanjung Pinang. Sedangkan pertambangan timah terdapat di kabupaten Karimun dan Lingga. Di samping itu, masih terdapat potensi pertambangan granit yang cukup besar di kabupaten Bintan. Data selengkapnya luas areal dan jumlah perusahaan tambang berdasarkan lokasi di Kepulauan Riau selama tahun 2005-2006 dapat terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**TABEL 1.1 – LUAS USAHA & JUMLAH PERUSAHAAN
MENURUT JENIS BAHAN GALIAN DAN LOKASI DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005-2006**

Kabupaten/Kota	Bauksit		Timah		Batu Besi		Granit		Pasir Darat	
	Luas (ha)	Jumlah Prshn	Luas (ha)	Jumlah Prshn	Luas (ha)	Jumlah Prshn	Luas (ha)	Jumlah Prshn	Luas (ha)	Jumlah Prshn
1. Karimun	16.000	2	37.847	1	-	-	446	11	630	13
2. Bintan	22.322	12	-	-	-	-	4.533	5	576	14
3. Natuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Lingga	-	1	39.135	3	43	1	50	1	-	-
5. Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tanjung Pinang	2.250	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	40.572	20	76.982	4	43	1	5.029	17	1.206	27

Sumber : Badan Pusat Statistik, "Kepulauan Riau Dalam Angka", 2005 (data sementara)

Sumber daya alam di wilayah provinsi Kepulauan Riau cukup berlimpah dan memberi kontribusi dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi ini. Kejelasan regulasi yang diikuti dengan pengawasan intensif masih mungkin dilakukan dalam upaya memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah provinsi Kepulauan Riau bulan Desember 2007, diketahui bahwa kontribusi bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp169.583.403.521,40 atau 52,2%, dimana PAD pada periode yang sama sebesar Rp324.899.098.448,83.

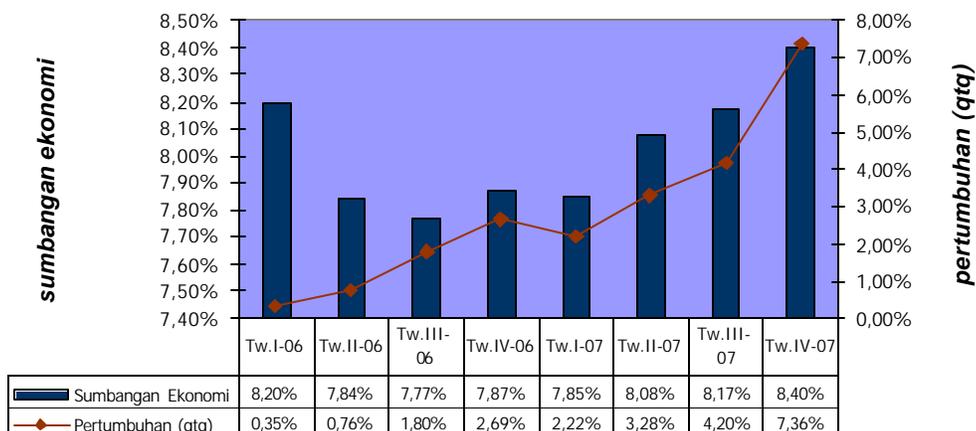
1.2.1.3. Komponen Perdagangan

Meningkatkan aktivitas perekonomian berkorelasi langsung terhadap peningkatan aktivitas perdagangan dari dan ke wilayah provinsi Kepulauan Riau. Keunggulan komparatif

Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore – *Growth Triangle*) disebabkan oleh letaknya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja yang berada di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia.

Atas keunggulan tersebut, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa daerah yang menjadikan Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai sektor ekonomi unggulan adalah Kabupaten Tanjung Balai Karimun dan Kota Tanjung Pinang. Sektor ini juga semakin berkontribusi terhadap perekonomian kota Batam, terutama pada sub-sektor Hotel dan Restoran. Sejalan dengan laju pertumbuhannya, kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Provinsi Kepulauan Riau juga terus meningkat sepanjang tahun 2007 dimana pada triwulan IV 2007 telah memberikan sumbangan ekonomi sebesar 8.40% terhadap PDRB Kepulauan Riau, meningkat dibandingkan *share* pada triwulan III 2007 sebesar 8,17%. Masing-masing sub-sektor mengalamikan peningkatan kontribusi, dimana kontribusi sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran mendominasi dengan peningkatan sebesar 0,20% menjadi 7,14% pada triwulan IV 2007, diikuti oleh sub-sektor Hotel dan Restoran dengan peningkatan kontribusi masing-masing sebesar 0,01% dibanding triwulan III 2007.

GRAFIK 1.7 – LAJU PERTUMBUHAN & KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PERIODE TW.I-2006 s/d. TW.IV-2007



Ditetapkannya Kota Tanjung Pinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, menjadikan pulau Bintan memiliki 3 (tiga) pemerintahan, yaitu sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan. Kota ini memiliki beragam kultur

budaya suku dari hampir seluruh Indonesia yang masuk ke kota ini dengan bahasa melayu sebagai bahasa daerah. Hal ini menjadi salah satu potensi untuk sektor ekonomi terutama sektor perdagangan yang sebelumnya telah menjadi sektor andalan di daerah ini.

Selain letak geografis yang strategis pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia, antara timur dan barat, antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan, tingginya kegiatan perdagangan sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Tanjung Pinang karena terbatasnya tanaman yang dapat tumbuh di daerah yang memiliki tekstur tanah pasir berlempung. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan makanan sebagian besar kebutuhan pangan diperoleh dari perdagangan antarpulau. Sayur-sayuran dipasok dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau Pekanbaru. Kebutuhan beras diperoleh dari Padang selain Thailand dan Myanmar, dan barang kelontong dan bahan bangunan disuplai dari Jakarta. Di samping itu, sektor pariwisata khususnya di kabupaten Bintan telah menjadi sektor unggulan dan semakin berkontribusi terhadap PDRB Kepulauan Riau secara keseluruhan.

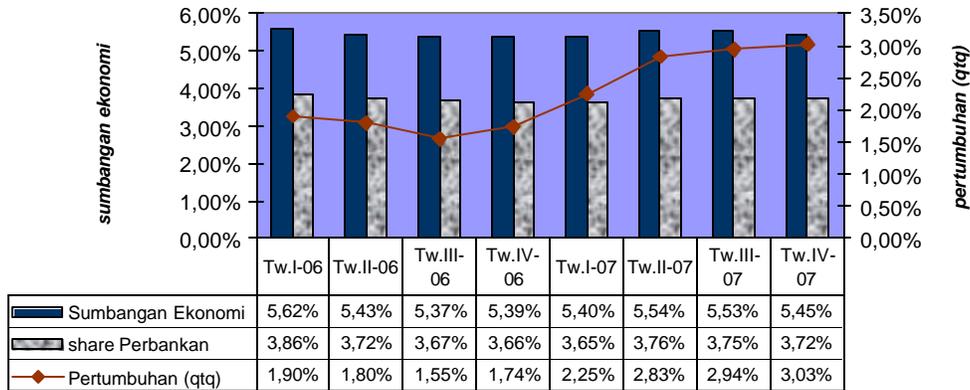
1.2.1.4. Komponen Keuangan

Melemahnya indikator DPK dan Asset perbankan di bulan Des-2007 yang disinyalir akibat pembayaran proyek-proyek pemerintah di akhir tahun dan terkait IPO PT. Satnusa Persada cukup memberikan pengaruh terhadap penurunan *share* sub-sektor Bank dari 3,75% pada triwulan III 2007 menjadi 3,72% di triwulan IV 2007. Karena nilainya yang sangat mendominasi, penurunan ini berdampak langsung pada berkurangnya sumbangan ekonomi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menjadi 5,45% pada triwulan IV 2007.

Adapun sub-sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan masing-masing berkontribusi sebesar 1,51% dan 0,04% terhadap PDRB Kepulauan Riau periode triwulan IV 2007. Di lain pihak, penurunan kontribusi justru diikuti oleh meningkatnya pertumbuhan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. Turunnya kontribusi lebih disebabkan karena tumbuhnya sektor lain dalam laju yang lebih tinggi dalam mendorong pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan pada triwulan IV 2007.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan masih dominan berdomisili di kota Batam dan Tanjung Pinang akibat tingginya aktivitas perekonomian di kota tersebut. Namun demikian, khususnya pihak perbankan daerah mulai melirik kabupaten lainnya sebagai akibat dari meningkatnya perekonomian di pulau-pulau sekitar Batam dan Tanjung Pinang.

GRAFIK 1.8 – LAJU PERTUMBUHAN & KONTRIBUSI SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PERIODE TW.I-2006 s/d. TW.IV-2007



1.2.1.5. Komponen Pertanian

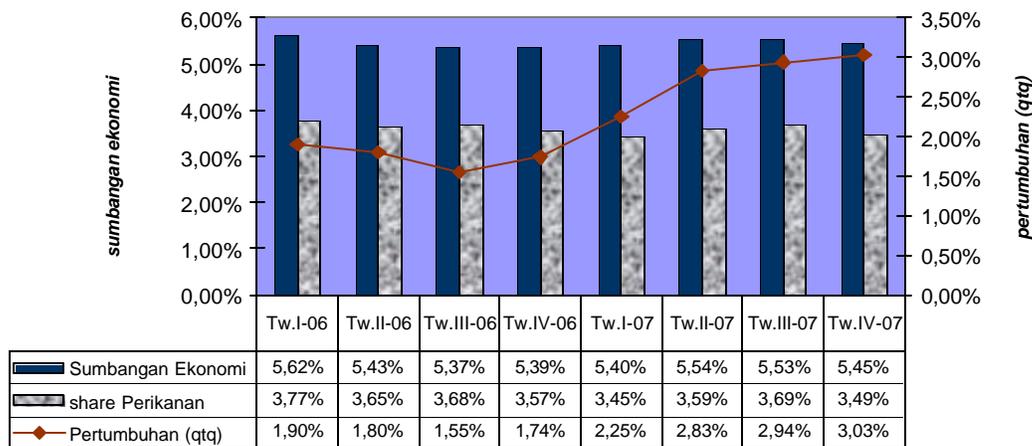
Sampai saat ini, sektor pertanian di provinsi Kepulauan Riau belum dapat berkembang secara maksimal karena luas daratan yang hanya 4,21% dari seluruh luas wilayah Kepulauan Riau. Masyarakat cenderung memilih kehidupan sebagai nelayan daripada sebagai petani. Akan tetapi, pertanian Kepulauan Riau masih bisa untuk dikembangkan mengingat masih adanya lahan yang memungkinkan sebagai lahan pertanian yang belum diolah.

Luas lahan sawah di Kepulauan Riau pada tahun 2005 mencapai 1.792 ha, sedangkan yang bukan lahan sawah sebesar 771.323 ha. Dalam penggunaan lahan sawah, Kabupaten Natuna masih menempati urutan teratas yang mencapai 1.232 ha dari seluruh luas lahan sawah di Kepulauan Riau. Hal ini menjadikan kabupaten Natuna sebagai pemasok padi dominan untuk wilayah Kepulauan Riau. Sedangkan untuk peternakan daerah penghasil terbesar adalah Batam untuk peternakan babi, diikuti oleh Natuna untuk peternakan sapi potong dan Karimun untuk peternakan kambing. (BPS, *Kepulauan Riau Dalam Angka 2005*)

Produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah-daerah tersebut sama sekali belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau, sehingga harus mendatangkannya dari provinsi-provinsi lain. Sektor Perikanan adalah satu-satunya produk pertanian yang sangat potensial dikembangkan di daerah ini sesuai dengan karakteristik daerahnya sebagai wilayah perairan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kontribusi sektor perikanan pada pembentukan PDRB provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,49%, sedangkan sumbangan ekonomi dari sektor Pertanian tercatat sebesar 4,87% pada periode triwulan IV 2007. Meski seluruh daerah memiliki potensi

terhadap sektor ini, tetapi penyumbang hasil laut terbesar adalah kabupaten Natuna, Bintan dan Batam.

GRAFIK 1.9 – LAJU PERTUMBUHAN & KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 PERIODE TW.I-2006 s/d. TW.IV-2007



Sesuai dengan pola tahunannya, laju pertumbuhan sektor Pertanian cenderung menurun di akhir tahun yang disebabkan karena faktor cuaca, berupa musim hujan dan gelombang laut yang tinggi. Selain terganggunya panen di beberapa sentra produksi di luar provinsi Kepulauan Riau, kendala distribusi akibat tingginya gelombang laut juga turut mempengaruhi perlambatan pada sektor ini. Searah dengan penurunan tingkat pertumbuhan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB juga tercatat menurun dari 5,07% pada triwulan III 2007 menjadi 4,87% pada triwulan IV 2007.

Mengingat pentingnya kemajuan sektor pertanian khususnya terhadap masyarakat kecil, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen untuk memajukan taraf hidup dan perekonomian kalangan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Kepri. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri mengalokasikan dananya untuk penguatan modal kalangan nelayan, tambak, dan budi daya ikan.

Kantor Bank Indonesia Batam sesuai dengan misinya sebagai katalisator perekonomian daerah, juga selalu berupaya untuk memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan daerah terutama terhadap sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu wujud kepedulian Bank Indonesia Batam terhadap sektor riil dan UMKM ditunjukkan dengan perannya sebagai fasilitator ditandatanganinya kesepakatan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Bank Mandiri Cabang Batam dan PT. Tiftonindo Duta Persada untuk melakukan pembiayaan kepada 40 nelayan di Desa Sembulang, Kecamatan Galang Kota Batam.

BOKS - III

PERAN STRATEGIS KBI BATAM DALAM DEWAN KAWASAN

Berbagai pandangan dan pendapat dalam upaya kepastian hukum terhadap kondisi investasi di Indonesia, khususnya di Batam, berakhir sesuai dengan harapan para stakeholder pemangku kepentingan, khususnya investor yang telah/hendak menanamkan modalnya di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). DPR, melalui pembahasan yang intensif sepakat menerima Perppu 1/ 2007 tentang Free Trade Zone (FTZ) menjadi Undang-undang pada awal Oktober lalu, yang sekaligus mencabut/mengamandemen UU No.36/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan pengesahan tersebut maka Batam secara resmi menjadi kawasan perdagangan bebas seluruh pulau plus Rempang dan Galang, sedangkan Bintan dan Karimun sebagai kawasan enclave.

Bersamaan dengan Perpu No 1/2007, pemerintah juga menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) masing-masing PP No. 46 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan PP No. 48/ 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah memberikan fasilitas kepada investor di BBK berupa pembebasan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan cukai selama 70 tahun.

Sehubungan dengan FTZ BBK, setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, yakni :

1. Posisi Dewan Kawasan
2. Posisi Badan Pengelolaan Kawasan, dan
3. Insentif yang ditawarkan kepada investor.

Dalam Pasal 3 mengenai Kelembagaan pada Perppu No. 1/2007 dijelaskan bahwa posisi Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul gubernur dan DPRD, sedangkan pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (BPKPB) yang berfungsi untuk percepatan pertumbuhan investasi di BBK ditetapkan oleh Dewan Kawasan. Beberapa pendapat mengusulkan DK FTZ BBK terdiri dari birokrat, pengusaha dan aparat keamanan, dimana DK juga akan merumuskan anggaran pembangunan infrastruktur untuk merangsang penanaman modal di BBK.

Perspektif Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 23 /1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 menegaskan bahwa tujuan Bank Indonesia (BI) adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Adapun stabilitas nilai rupiah dapat dicapai melalui stabilitas harga barang dan jasa (inflasi), dan stabilitas nilai tukar. Sejalan dengan tujuan tersebut, BI menerapkan kerangka kebijakan moneter yang secara konsisten diarahkan pada pencapaian target inflasi (Inflation Targeting Framework-ITF) yang secara eksplisit telah ditetapkan dan diumumkan oleh pemerintah. BI menjadikan sasaran inflasi (stabilitas harga) sebagai prioritas pencapaian (overriding objective) dan acuan (nominal anchor) dari kebijakan moneter yang ditempuh.

Efektivitas suatu kebijakan moneter tidak akan tercapai tanpa koordinasi yang harmonis dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal dan sektor riil. Demikian sebaliknya, kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan efektif tanpa situasi moneter yang stabil. Keduanya harus berjalan secara simultan dan konsisten untuk menghasilkan suatu kebijakan yang kredibel dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Untuk memastikan kebijakan yang ditempuh dapat berjalan secara efektif, Bank Indonesia berusaha meningkatkan perannya secara langsung melalui Kantor-kantor Bank Indonesia yang berada di daerah. Kantor-kantor Bank Indonesia diharapkan menjadi katalisator pembangunan ekonomi di wilayah kerjanya. Transformasi tersebut diterjemahkan dalam misi dan visi Kantor Bank Indonesia (KBI) sebagai berikut:

Misi : Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

Visi : Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

Dalam kaitannya dengan Dewan Kawasan sebagai penentu arah kebijakan pengelolaan kawasan bebas Batam, Rempang, Galang, Bintan dan Karimun, Bank Indonesia melalui KBI Batam diharapkan berjalan berdampingan dan berperan aktif agar kebijakan moneter menjadi efektif serta sasaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai.

Peran strategis KBI Batam sebagai mitra pemerintah daerah dan Dewan Kawasan akan ditinjau berdasarkan kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh KBI Batam.

Kelebihan yang Dimiliki

Keberadaan Kantor Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran yaitu sebagai pusat data, informasi, riset/kajian ekonomi dan fasilitator pemberdayaan sektor riil (korporasi, BUMN dan UMKM) seperti yang dijabarkan dalam tugas-tugas pokok yang berhubungan dengan *stakeholder* eksternal berikut ini.



Berdasarkan tugas-tugas pokoknya, peran KBI Batam dalam memberikan data-data, informasi, kajian dan saran yang berkaitan dengan kondisi moneter, perkembangan sistem pembayaran dan perbankan akan sangat membantu Dewan Kawasan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif sehubungan dengan kegiatan investasi dan perekonomian di provinsi Kepulauan Riau.

Selain dari kajian-kajian yang sifatnya situasional menurut kebutuhan, beberapa produk rutin dari KBI Batam yang bisa digunakan sebagai referensi oleh *stakeholder* khususnya Dewan Kawasan, pemerintah daerah, dan investor antara lain :

- Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kepulauan Riau → terbit secara triwulanan, berisikan kajian perkembangan ekonomi regional, inflasi daerah, keuangan daerah, perbankan daerah, sistem pembayaran di wilayah kerja KBI Batam, serta prakiraan ekonomi dan inflasi dalam triwulan ke depan.
- Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Kepulauan Riau → terbit secara bulanan, memuat data-data statistik perbankan, perdagangan internasional, index harga konsumen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kegiatan investasi.
- Survey Kegiatan Dunia Usaha → terbit secara triwulanan, merupakan kompilasi dari Survey Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan di 37 (tiga puluh tujuh) Kantor Bank Indonesia yang tersebar di wilayah Nusantara.
- Survey Harga Properti Residensial → terbit secara triwulanan, berisi informasi mengenai perkembangan harga property residensial sesuai dengan klasifikasi tipe rumah dan target market sektor properti yang sedang berkembang, serta prakiraan pada triwulan berikutnya.

Keterbatasan

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 /1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia menjadi Lembaga Negara yang independen. Dalam kaitannya dengan Dewan Kawasan, posisi BI khususnya KBI Batam yang secara struktural bukan merupakan elemen pemerintah pusat maupun daerah menjadi suatu keterbatasan untuk ikut serta dalam memberikan masukan atau memutuskan suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah atau dalam hal ini nantinya oleh Dewan Kawasan.

Peluang KBI Batam dalam Dewan Kawasan

Kompleksitas tugas dan kelengkapan data yang dimiliki Bank Indonesia menjadi suatu peluang bagi KBI Batam untuk menjadi **mitra strategis** Dewan Kawasan. Sebagai lembaga negara yang independen, KBI Batam bisa bertindak sebagai *data source* dan pemberi saran yang objektif sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil Dewan Kawasan dapat lebih optimal dan komprehensif. Independensi yang dimiliki menjadikan BI bebas dari kepentingan-kepentingan politik yang acap kali membuat suatu kebijakan menjadi *bias*.

Tantangan yang Dihadapi

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang menghasilkan data-data terkait dengan nilai tukar Rupiah, perkembangan perbankan dan sistem pembayaran. Meskipun diluar itu masih terdapat beberapa lembaga lain yang menghasilkan data-data dan kajian seperti yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain :

- Badan Pusat Statistis (BPS)
- Departemen Keuangan
- Departemen Perindustrian
- Departemen Perdagangan
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Lembaga dan Asosiasi lainnya.

Terkait dengan banyaknya lembaga lain yang mengeluarkan data dan kajian serupa, akan menjadi tantangan bagi Bank Indonesia, khususnya KBI Batam untuk dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan dipercaya.

Kesimpulan

Manfaat diberlakukannya FTZ haruslah sesuai dengan tujuan awalnya guna menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan devisa dan penerimaan negara melalui pajak-pajak langsung, menciptakan *multiplier effect* ekonomi domestik, menumbuhkan industri korporasi dan UMKM dalam perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguasaan teknologi dan keterampilan. Stabilitas moneter dan fiskal serta pertumbuhan sektor riil diarahkan guna mengendalikan laju inflasi sesuai dengan sasaran akhir yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank Indonesia dan pemerintah daerah harus bersama-sama menciptakan kondisi yang pro-investasi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Kepulauan Riau, khususnya di wilayah perdagangan bebas BBK.

Menilik sifat FTZ yang lintas-instansi dan pengelolaan yang terintegrasi dalam kebijakan, menurut hemat kami perlu kiranya KBI Batam sesuai dengan peran strategisnya sebagai katalisator perekonomian daerah, dilibatkan secara independen sebagai **sumber data** dan **advisor** (pemberi masukan) bagi Dewan Kawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi sehingga kebijakan dan keputusan yang ditempuh menjadi lebih optimal dan komprehensif.

Dengan demikian, maka koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait dalam penyediaan data menjadi sangat penting agar validitas dan reliabilitas hasil kajian-kajian yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia dapat dipakai *stakeholders* sebagai referensi pengambilan kebijakan dan keputusan investasi.

1.3. PERKEMBANGAN PARIWISATA

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga Oktober 2007, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke provinsi Kepulauan Riau melalui 4 pintu masuk, yaitu Batam, Bintan, Tanjung Pinang dan Karimun mengalami kenaikan 2,43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006.

TABEL 1.2 – PERKEMBANGAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA BERDASARKAN PINTU MASUK KE WILAYAH KEPULAUAN RIAU

Pintu Masuk	2006	2007	?
1. Batam	842.061	869.025	3.20%
2. Bintan	244.222	250.151	2.43%
3. Tanjung Pinang	95.230	97.542	2.43%
4. Karimun	129.496	126.118	-2.61%
Jumlah	1.311.009	1.342.836	2.43%

Sumber : Badan Pusat Statistik

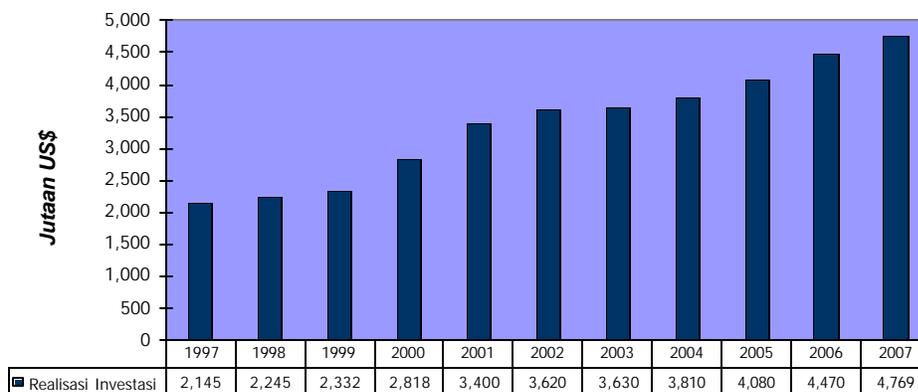
Kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara terbesar pada tahun 2007 adalah melalui pintu masuk kota Batam yang meningkat 3,20% dibandingkan tahun 2006 menjadi 869.025 orang. Kunjungan turis asing melalui pintu masuk Bintan sebesar 250.151 orang dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 97.542 orang, atau masing-masing meningkat sebesar 2,43%. Sedangkan kunjungan melalui pintu masuk Tanjung Pinang mengalami penurunan 2,61% menjadi 126.118 orang.

Dalam memanfaatkan momentum Visit Indonesia Year tahun 2008, provinsi Kepulauan Riau perlu berbenah untuk lebih mengembangkan sektor pariwisata. Untuk itu diperlukan upaya oleh pihak-pihak terkait untuk memanfaatkan potensi yang ada, serta menciptakan *event-event* yang dapat menjadi daya tarik bagi wisman untuk berkunjung ke Batam. Upaya Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Provinsi Kepri salah satunya dengan pembangunan jalan lintas barat sepanjang 47 km yang menghubungkan Desa Busung Kecamatan Bintan Utara dengan Kecamatan Gunung Kijang dimana rencananya di jalur lintas selebar 50m tersebut akan dibangun 5 jembatan.

1.4. PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Berdasarkan keterangan Kabiro Humas Otorita Batam, Rusliden Hutagaol, selama Januari-Desember 2007 terdapat 79 proyek baru PMA yang disetujui aplikasinya dengan nilai investasi 288.528.794 dolar AS atau meningkat 56% dibandingkan tahun 2006 yang mencapai US\$ 184.994.162. Di samping itu ada empat aplikasi perluasan usaha PMA yang telah disetujui senilai US\$ 10.335.871, atau total selama tahun 2007 total investasi PMA mencapai US\$ 298.864.665. Selain PMA, pada Januari-Desember 2007 juga terdapat empat aplikasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) baru senilai Rp1,926 triliun dan satu aplikasi PMDN perluasan usaha senilai Rp600 miliar.

GRAFIK 1.10 – PERKEMBANGAN INVESTASI ASING DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Investasi PMA yang disetujui selama tahun 2007 antara lain berasal dari Singapura, Taiwan, Kanada, dan Emirat Arab, Korea Selatan, Jerman, Jepang, India, AS, Australia, Inggris, Malaysia, Irlandia, Belanda, British Virgin Island, Caymand Island, Swiss, China. Bidang usahanya adalah industri untuk berbagai pekerjaan khusus logam 6 proyek, industri pembuatan kapal 11 proyek, industri lensa kontak 1 proyek, penyediaan tenaga listrik 1 proyek, industri pipa dari besi dan baja 3 proyek, perdagangan besar (distributor utama, ekspor/ impor) 16 proyek, industri dan jasa lainnya 41 proyek yang didominasi industri elektronik dan *shipyard*. Otorita berpendapat bahwa pada tahun 2008, sudah ada beberapa PMA besar bakal masuk Batam, salah satunya dari Dubai yang akan berinvestasi di bidang *shipyard*.

Meski dilihat dari jumlah perusahaan PMA yang berinvestasi mengalami penurunan, namun nilai investasi menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya ekspektasi dan kepercayaan kalangan pengusaha terhadap pemerintah menyusul disahkannya UU FTZ BBK pada awal bulan Oktober 2007.

Terkait investasi asing di Kepulauan Riau khususnya kota Batam belakangan ini juga terdapat beberapa isu negatif yang mencerminkan belum stabilnya iklim investasi menjelang penerapan FTZ. Antara lain penutupan sejumlah industri yakni PT. Livatech Elektronik Indonesia (LEI), PT. Polestar Plastic Batam (PPB) dan PT. Panasonic Bateray serta demo karyawan PT. Hitech dan PT. Nippon Steel di Batam. Tutupnya LEI dan PPB akibat ditinggal oleh pemilik masih menyisakan persoalan pesangon terhadap sekitar 1.700 karyawannya. Panasonic Bateray menghentikan operasionalnya akibat kecilnya permintaan dan kalah bersaing dengan baterai-baterai lithium saat ini. Sedangkan demo karyawan disinyalir karena beredarnya kabar bahwa perusahaan akan tutup disebabkan banyaknya komplain dari pihak prinsipal di Jepang. Belum tumbuhnya investasi di Batam sesuai dengan harapan tidak terlepas dari belum stabilnya iklim investasi.

Meskipun implementasi FTZ yang belum bisa berjalan karena masih terjadi tarik ulur yang berhubungan dengan masalah struktural, hukum, dan politik juga diduga turut mempengaruhi ekspektasi pengusaha yang baru mulai pulih. Namun demikian, optimisme di tahun 2008 diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan investor untuk segera berinvestasi di wilayah Kepulauan Riau.

Berdasarkan data Otorita Batam tahun 2005 bahwa investasi terbesar berasal dari negara Singapura (65,54%), diikuti Jepang (16,16%), Malaysia (6,31%) dan Taiwan (4,19%). Adapun investasi Amerika hanya 2,40% dari total investasi yang masuk pada tahun 2005. Sama halnya dengan jumlah perusahaan, Singapura memiliki 301 perusahaan atau 37,02% dari total

perusahaan yang berinvestasi selama tahun 2005. Kemudian menyusul PMA Malaysia (2,58%) dan Taiwan (2,46%) dan PMA Amerika yang berinvestasi langsung di Kepulauan Riau sebanyak 9 perusahaan (1,11%). Sedangkan Perusahaan berbentuk *Joint Venture* adalah yang terbanyak berinvestasi di Kepulauan Riau sebanyak 405 perusahaan atau 49,82% dari total PMA.

1.5. PERKEMBANGAN EKSPOR - IMPOR DI WILAYAH KERJA BATAM

Total ekspor non-migas termasuk dari kawasan berikat di wilayah kerja Batam selama periode Jan-Nov 2007 senilai US\$ 6,36 milyar meningkat 12,92% dibandingkan tahun 2006, walaupun volume ekspor mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu 279,65. Sementara itu nilai impor non-migas ke wilayah Batam selama periode Januari s/d. November 2007 sebesar US\$8,09 milyar, turun sekitar 10,93% dibandingkan tahun 2006 yang tercatat sebesar US\$9,08 milyar.

TABEL 1.4 – PERKEMBANGAN EKSPOR-IMPOR KEPULAUAN RIAU

Keterangan	2005	2006	2007*
1. Nilai Ekspor (US\$)	5,669,920,605	5,637,067,842	6,365,635,043
2. Volume Ekspor (kg)	15,321,999,640	23,267,496,635	17,109,106,700
3. Nilai Impor (US\$)	6,719,880,935	9,084,537,006	8,091,442,453
4. Volume Impor (kg)	1,983,770,991	2,601,408,359	2,437,916,315

Sumber : DSM-BI *) data s/d. Nov-2007

Dari seluruh ekspor tersebut, sekitar 33,26% disumbangkan dari penjualan mesin peralatan listrik ke luar negeri, diikuti oleh ekspor pesawat mekanik sekitar 25,4%, dan benda besi serta baja sekitar 7,41%. Menyusul setelahnya ekspor perangkat optik, kapal laut, karet atau barang dari karet, produk kimia, kendaraan serta bagiannya, bijih, kerak, dan abu logam serta minyak serta lemak hewan nabati.

TABEL 1.5 – SHARE EKSPOR KE NEGARA TUJUAN TERBESAR

NEGARA	2003	2004	2005	2006	2007
Singapore	62.73%	68.30%	69.92%	66.64%	62.61%
America	7.08%	5.10%	5.09%	6.79%	5.91%
Europe	6.58%	6.02%	4.34%	5.31%	5.83%
Japan	9.19%	8.37%	7.93%	5.90%	5.20%
Australia	0.88%	0.64%	0.71%	2.41%	5.13%
China	1.31%	1.37%	1.56%	2.43%	4.77%
Other Asia	0.85%	0.74%	1.42%	2.18%	2.41%
France	1.35%	1.50%	1.04%	1.64%	1.96%
Hongkong	1.68%	1.37%	1.23%	1.65%	1.72%
Netherland	1.86%	1.40%	1.00%	1.50%	1.54%

Sumber : DSM-BI (data diolah)

Menurut negara tujuan ekspor, lebih dari setengahnya atau sekitar 62,61% diekspor ke Singapura. Kemudian, ke Amerika sekitar 5,91%, Eropa sebesar 5,83%, dan Jepang sekitar 5,20%. Menyusul setelah itu ke Australia, Cina, Negara Asia lainnya, Perancis, Hongkong dan Belanda. Melihat perkembangannya, ekspor ke Singapura, Amerika dan Jepang cenderung menurun yang diduga sebagai dampak dari melambatnya perekonomian global akibat resesi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Sedangkan ekspor ke negara Eropa, Australia, Cina, Negara Asia lainnya dan Prancis menunjukkan peningkatan.

Adanya kenaikan permintaan di negara berkembang terutama Asia sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut yakni sebesar 6,9% (IMF) yang didorong oleh pesatnya perekonomian Cina dan India, dapat dijadikan alternatif strategi guna mengalihkan ekspor Kepulauan Riau dari negara-negara maju yang lebih terkena dampak resesi Amerika ke negara-negara Asia yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi pasar ekspor ke China dan India serta negara berkembang Asia yang memiliki tingkat permintaan lebih tinggi, kinerja ekspor provinsi Kepulauan Riau diharapkan tidak menurun dan survive dalam menghadapi dampak langsung maupun tidak langsung dari resesi ekonomi yang terjadi di Amerika.

Berdasarkan pantauan BPS, selama bulan September 2007, ekspor terbesar dikirim melalui pelabuhan Batu Ampar, Batam sekitar US\$ 241,72 juta. Kemudian melalui pelabuhan Sekupang, Batam sekitar US\$ 109,33 juta serta melalui pelabuhan Kabil-Panau, Batam sekitar US\$ 107,22 juta. Kontribusi ketiga pelabuhan ekspor di Batam itu sekitar 84,57% dari seluruh ekspor Provinsi Kepulauan Riau.

Meskipun data kumulatif nilai Impor yang tersedia baru sampai bulan November 2007 secara rata-rata nilai Impor cenderung mengalami penurunan. Selain sebagai tujuan ekspor terbesar, impor terbesar juga berasal dari Singapura dimana *share*-nya sekitar 72% dari seluruh nilai total impor Kepri. Negara asal impor terbesar berikutnya, adalah Malaysia sekitar 16,09%, kemudian disusul China sekitar 4,67%, diikuti oleh Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Australia, Thailand, Brazilia, dan Korea Selatan. Meski demikian, provinsi Kepulauan Riau masih berperan sebagai net-importir, dimana selama Jan-Nov 2007 tercatat net-impor sebesar US\$1,72 milyar.

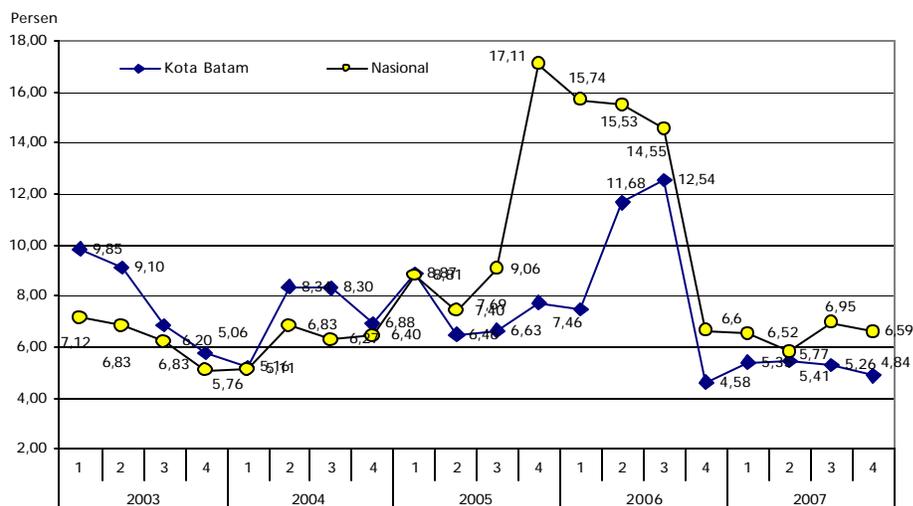
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

2.1. KONDISI UMUM

Laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang diukur Kota Batam pada triwulan IV 2007 menurun. Laju inflasi tercatat sebesar 1,56% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,15% (qtq) serta lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2006 yang mencapai 1,97% (qtq). Berdasarkan perhitungan tahun kalender (ytd) sampai dengan Desember 2007 laju inflasi Kota Batam tercatat sebesar 4,84% (ytd) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2006 yang mencapai 4,58% (ytd). Tekanan inflasi yang lebih rendah pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat yang cukup lancar terutama pada menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri.

Dibandingkan dengan inflasi nasional, laju inflasi kota Batam tercatat lebih rendah sebesar 1,75%. Jika inflasi nasional untuk triwulan IV 2007 tercatat sebesar 6,59% (yoy) maka laju inflasi Kota Batam adalah sebesar 4,84%. Trend perkembangan inflasi kota Batam sampai dengan triwulan akhir 2007 selalu berada di bawah laju inflasi nasional. Salah satu penyebabnya adalah karena harga kebutuhan hidup di Batam sudah relatif lebih tinggi dari harga kebutuhan hidup di daerah lain.

GRAFIK 2.1 – PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN BATAM & NASIONAL

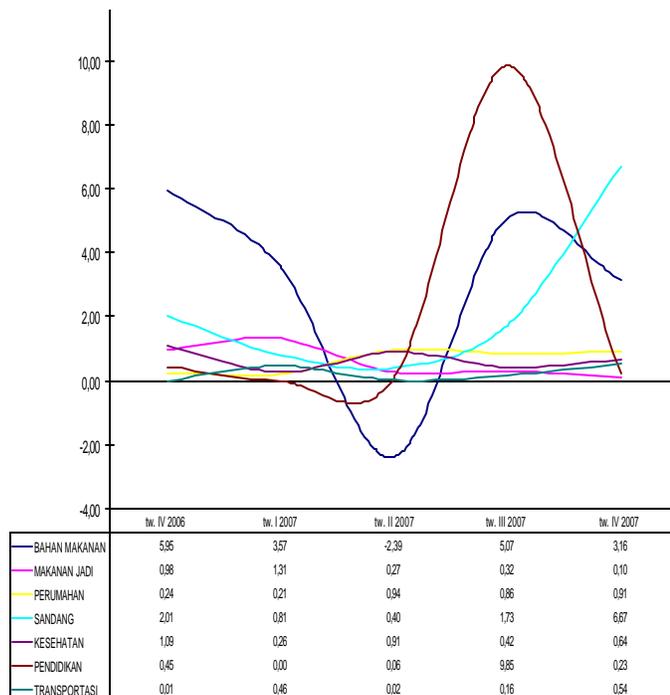


2.2. INFLASI TRIWULANAN (qtq)

Secara triwulanan, laju inflasi Kota Batam juga mengalami pada triwulan IV 2007 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan III 2007 laju inflasi kota Batam tercatat 2,15% (qtq) maka pada triwulan IV 2007 laju inflasi Kota Batam tercatat sebesar 1,56. Penurunan laju inflasi ini disebabkan karena pasokan bahan kebutuhan pokok, terutama dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi ke Kota Batam cukup lancar terutama menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Namun jika dilihat secara bulanan laju inflasi Kota Batam sampai dengan triwulan IV 2007 menunjukkan trend peningkatan.

Selama tiga bulan (Oktober, November, Desember) berturut-turut laju inflasi Kota Batam adalah 0,12% (mtm), 0,52% (mtm) dan 0,92% (mtm). Peningkatan laju inflasi pada bulan Desember salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah terkait dengan musim penghujan yang menyebabkan supply komoditas ini ke Kota Batam menurun. Selain itu kenaikan harga minyak goreng seiring meningkatnya harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional juga ikut memberikan kontribusi terhadap laju inflasi pada bulan triwulan akhir 2007.

INFLASI TRIWULANAN KOTA BATAM
Grafik 2.2. INFLASI TRIWULANAN KOTA BATAM



Berdasarkan kontribusinya, kelompok bahan makanan masih merupakan penyumbang utama dalam pembentukan angka inflasi sampai dengan triwulan akhir 2007 yang tercatat sebesar 0,88%. Sementara itu kelompok lain memberikan sumbangan inflasi secara total sebesar 0,64%, dimana kontributor utama adalah kelompok sandang (0,29%) dan perumahan, air, listrik dan bahan bakar (0,22%). Peningkatan sumbangan inflasi kelompok sandang yang cukup signifikan pada triwulan laporan (0,21%) terutama disebabkan kenaikan permintaan sandang pada saat Hari Raya Idul Fitri.

Tabel 2.1. PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULANAN KOTA BATAM

KELOMPOK	Triwulan II 2007		Triwulan III 2007		Triwulan IV 2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
I Bahan Makanan	-2,39	-0,61	5,07	1,43	3,16	0,88
II Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,27	0,04	0,32	0,05	0,10	0,01
III Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar	0,94	0,13	0,86	0,22	0,91	0,22
IV Sandang	0,40	0,02	1,73	0,08	6,67	0,29
V Kesehatan	0,91	0,02	0,42	0,01	0,64	0,02
VI Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,06	0,00	9,85	0,35	0,23	0,01
VII Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,02	0,00	0,16	0,03	0,54	0,09
INFLASI	-0,40		2,14		1,56	

Sumber : BPS (diolah)

2.3. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG

Dilihat dari komoditasnya, penyumbang utama inflasi pada triwulan IV 2007 masih didominasi dari kelompok makanan (*food*) antara lain bawang merah, beras, tomat sayur, minyak goreng, kangkung, mie kering instan, daging sapi dan susu kental manis. Sedangkan penyumbang inflasi terbesar yang bukan berasal dari kelompok makanan (*non food*) antara lain emas perhiasan dan gas elpiji. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan sumbangan deflasi yang berasal dari kelompok makanan (*food*) adalah sotong, kacang panjang, ketimun, cabe merah, daging ayam ras. Sedangkan yang berasal dari bukan kelompok makanan (*non food*) adalah *hand body lotion*.

Tabel 2.2.10 – KOMODITAS PENYUMBANG INFLASI DAN DEFLASI KOTA BATAM

No.	Komoditas	Sumbangan	Inflasi	Komoditas	Sumbangan	Inflasi
1.	Bawang Merah	0,3478	76,41	Sotong	-0,0823	-16,30
2.	Emas Perhiasan	0,1376	16,11	Kacang Panjang	-0,0566	-17,43
3.	Beras	0,0995	2,21	Ketimun	-0,0488	-30,94
4.	Tomat Sayur	0,0973	35,06	Cabe Merah	-0,0401	-3,71
5.	Minyak Goreng	0,0772	4,87	Daging Ayam Ras	-0,0379	-2,22
6.	Gas Elpiji	0,0712	12,91	Minuman Ringan	-0,0183	-6,59
7.	Kangkung	0,0437	9,34	Jeruk	-0,0096	-1,40
8.	Mie Kering Instan	0,0437	8,16	Air Kemasan	-0,0068	-1,61
9.	Daging Sapi	0,0475	4,18	Nangka Muda	-0,0015	-1,39
10.	Susu Kental Manis	0,0435	9,47	Hand Body Lotion	-0,0007	-0,68

2.3.1. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan pada triwulan IV 2007 mengalami inflasi sebesar 3,16% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,88%. Berdasarkan sub kelompoknya inflasi tertinggi berasal dari bumbu-bumbuan sebesar 13,04% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,33%, diikuti inflasi sub kelompok lemak dan minyak sebesar 5,35% (qtq) dengan sumbangan sebesar 0,11% dan inflasi sub kelompok kacang-kacangan sebesar 4,87% (qtq) dengan sumbangan inflasi 0,03% terhadap pembentukan inflasi Kota Batam.

Berdasarkan komoditasnya, bawang merah merupakan penyumbang terbesar pembentukan inflasi Kota Batam pada triwulan laporan sebesar 0,35% disusul beras dan tomat sayur masing-masing sebesar 0,10%. Sedangkan ditinjau dari perkembangan harga secara triwulanan, komoditas bawang merah mengalami kenaikan sebesar 76,41%, beras mengalami kenaikan sebesar 2,21% (qtq) dan tomat sayur mengalami kenaikan sebesar 35,06%(qtq).

Di sisi lain, komoditas sotong merupakan penyumbang deflasi terbesar pada triwulan laporan yaitu sebesar 0,08% disusul kacang panjang dan ketimun sebesar 0,06% dan 0,05%. Sedangkan ditinjau dari perkembangan harga secara triwulanan, komoditas sotong mengalami penurunan harga sebesar 16,30% (qtq), kacang panjang sebesar 17,43% dan ketimun sebesar 30,94%.

2.3.2. Kelompok Makanan Jadi

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan IV 2007 mengalami inflasi triwulanan sebesar 0,10% (qtq) atau dengan laju inflasi tahunan sebesar 2,01% (yoy). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi tercatat pada kelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,46% (qtq) dengan sumbangan 0,02% diikuti kelompok makanan jadi sebesar 0,04% (qtq) dengan sumbangan sebesar 0,003%.

Komoditas penyumbang inflasi terbesar pada kelompok ini adalah rokok kretek filter dengan sumbangan inflasi sebesar 0,015% diikuti rokok putih dengan sumbangan inflasi sebesar 0,013% dan gula pasir masing-masing sebesar; dan 0,010% dengan inflasi masing-masing sebesar 0,47% (qtq), 0,85% (qtq), dan 1,34% (qtq).

2.3.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada triwulan laporan mengalami inflasi triwulanan sebesar 0,91% (qtq) dengan laju inflasi tahunan sebesar 2,95% (yoy). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok perlengkapan rumah

tangga sebesar 1,09% (qtq) dengan sumbangan sebesar 0,012%, diikuti oleh sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air dengan inflasi sebesar 0,97% (qtq) dan sumbangan sebesar 0,071%.

Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah gas elpiji dengan sumbangan inflasi sebesar 0,071%, diikuti oleh sewa rumah dengan sumbangan inflasi sebesar 0,064%, dan tukang bukan mandor dengan sumbangan inflasi sebesar 0,046% dengan inflasi masing-masing sebesar 12,91% (qtq), 0,62% (qtq) dan 8,34% (qtq).

2.3.4. Kelompok Sandang

Kelompok sandang pada triwulan IV 2007 mengalami inflasi sebesar 6,67% (qtq) dengan laju inflasi tahunan sebesar 9,82% (yoy). Inflasi pada kelompok sandang pada triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,73% (qtq). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi tercatat pada sub kelompok barang pribadi dan sandang lainnya sebesar 13,95% (qtq) dengan sumbangan sebesar 0,146%, diikuti oleh sub kelompok sandang wanita dengan inflasi sebesar 4,97% (qtq) dan sumbangan sebesar 0,063%.

Sedangkan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah emas dan perhiasan sebesar 0,074% (qtq) dengan inflasi sebesar 9,30% (qtq). Komoditas penyumbang inflasi terbesar berikutnya adalah baju muslim yang memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,28% dengan laju inflasi sebesar 11,30% (qtq). Peningkatan harga untuk kelompok sandang khususnya baju muslim terkait dengan kebutuhan baju muslim yang meningkat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri.

2.3.5. Kelompok Kesehatan

Laju inflasi pada kelompok kesehatan di Kota Batam pada triwulan IV tahun 2007 sebesar 0,64% (qtq) dengan laju inflasi tahunan sebesar 2,26% (yoy). Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,42% (qtq). Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi hanya dialami oleh sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika yang tercatat sebesar 1,10% (qtq) dengan sumbangan sebesar 0,019%. Sedangkan dari sisi komoditas, penyumbang inflasi terbesar adalah sabun mandi sebesar 0,013% dengan inflasi sebesar 4,81% (q-t-q).

2.3.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga pada triwulan laporan mengalami inflasi sebesar 0,23% (qtq) jauh dibawah angka inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,85% (qtq). Sedangkan dari sisi tahunan, kelompok ini mengalami inflasi 10,17% (yoy). Berdasarkan sub kelompoknya, kenaikan harga hanya terjadi pada sub kelompok jasa pendidikan yang tercatat sebesar 0,40% (qtq) dengan sumbangan sebesar 0,009%. Sedangkan dari sisi komoditas, penyumbang inflasi untuk kelompok ini adalah jasa pendidikan untuk sekolah dasar sebesar 0,009% dengan laju inflasi sebesar 1,04% (qtq).

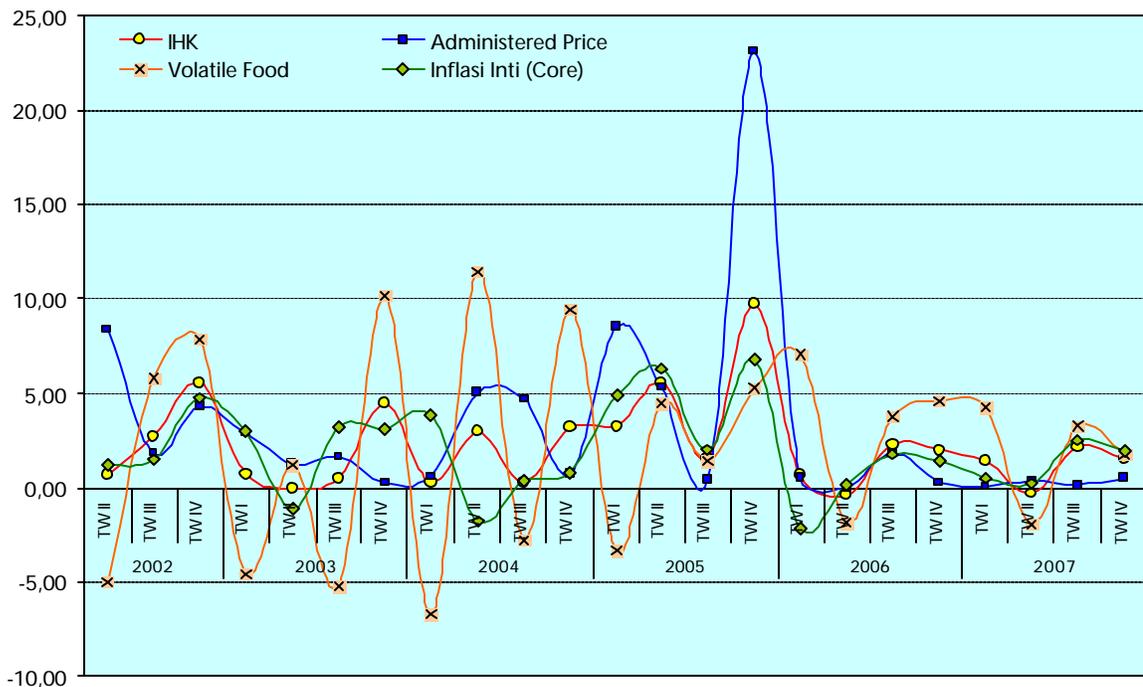
2.3.7. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kenaikan harga yang terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan di Kota Batam pada triwulan IV 2007 adalah sebesar 0,54% (qtq) dengan laju inflasi tahunan sebesar 1,19% (yoy). Inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan laporan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,16% (qtq). Berdasarkan sub kelompoknya, laju inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok sarana dan penunjang transportasi sebesar 10,99% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,063%. Sedangkan berdasarkan komoditasnya, inflasi tertinggi disumbangkan oleh jasa ganti oli sebesar 0,059% (qtq) dengan laju inflasi sebesar 42,86% (qtq).

2.4. DISAGREGASI INFLASI

Hasil perhitungan disagregasi inflasi di Kota Batam selama triwulan IV 2007 menunjukkan bahwa inflasi inti (*core inflation*) secara tahunan mengalami kenaikan namun secara triwulanan mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada inflasi volatile food baik yang menurun baik secara tahunan maupun triwulanan terhadap triwulan sebelumnya. Sebaliknya inflasi administred prices mengalami kenaikan baik secara tahunan maupun triwulanan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 2.3 – PERKEMBANGAN DISAGREGASI INFLASI



2.4.1. Inflasi Inti

Inflasi inti (*core inflation*) Kota Batam yaitu inflasi yang murni dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran tercatat secara tahunan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,04% (yoy) menjadi sebesar 4,46% (y-o-y) pada triwulan laporan. Namun secara triwulanan laju inflasi inti Kota Batam mengalami penurunan menjadi sebesar 1,91% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,96% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,48% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 1,28%.

2.4.2. Inflasi Non Inti

Inflasi non inti Kota Batam pada triwulan laporan mengalami penurunan menjadi sebesar 1,19% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,88% (qtq). Penurunan laju inflasi non inti Kota Batam salah satunya dipengaruhi oleh penurunan harga untuk barang-barang *volatile food*. Sedangkan inflasi administred price justru mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 2.3 Disagregasi Inflasi Kota Batam

KATEGORI	Triwulan III 2007		Triwulan IV 2007	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
Inflasi Inti (Core Inflation)	2,48	1,28	1,91	0,96
Inflasi Non Inti (Non Core Inflation)	1,81	0,88	1,19	0,58
- Administered Price	0,11	0,03	0,51	0,11
- Volatile Food	3,23	0,86	1,75	0,47
Food	3,19	1,48	1,99	0,90
Non Food	1,27	0,69	1,19	0,64
Traded	2,01	1,14	1,55	1,20
Non Traded	-1,55	1,03	1,28	0,34
INFLASI	2,17		1.56	

2.4.2.1. Volatile Food

Inflasi volatile food Kota Batam pada secara tahunan mengalami penurunan kenaikan dari sebesar 15,47% (yoy) pada triwulan III 2007 menjadi sebesar 10,85%(yoy) pada triwulan laporan. Sedangkan secara triwulanan, turun dari sebesar 3,23% (qtq) pada triwulan III 2007 menjadi sebesar 1,75% (qtq) pada triwulan akhir 2007. Penurunan ini disumbang oleh salah satu komoditas yang termasuk *volatile food* yaitu semangka yang menyumbang deflasi sebesar 0,082% dengan laju deflasi sebesar 16,30% (qtq).

2.4.2.2. Administred Price

Administered prices pada triwulan IV 2007 secara tahunan mengalami penurunan menjadi sebesar 1,03% (yoy) dibandingkan triwulan III 2007 yang tercatat sebesar 0,81% (yoy). Secara triwulanan, *administred prices* juga mengalami kenaikan dari 0,11% (qtq) pada triwulan III 2007 menjadi sebesar 1,75% (qtq) pada triwulan laporan. Kenaikan laju inflasi salah satunya didorong oleh kenaikan harga gas elpiji yang mengalami inflasi sebesar 12,91% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,0712%.

BOKS - IV

Survei Ekspektasi Konsumen Juli-Desember 2007

Ekspektasi Harga

Hasil Survei Ekspektasi Konsumen yang dilakukan Kantor Bank Indonesia Batam untuk periode Oktober-Desember 2007 menunjukkan indeks ekspektasi harga umum yang optimis dengan indeks 168,6. Nilai indeks tersebut mencerminkan ekspektasi konsumen bahwa harga-harga barang dan jasa secara umum akan meningkat dalam 6-12 bulan mendatang. Sebagian besar responden mengidentifikasi kenaikan dipicu oleh berkurangnya ketersediaan barang/jasa dan stabilitas situasi keamanan/sosial politik. Tingginya ekspektasi juga diakibatkan oleh terjadinya peningkatan harga-harga secara umum di kota Batam sepanjang tahun 2007. Ekspektasi harga tertinggi diperkirakan terjadi pada kelompok perumahan dan bahan bangunan dengan indeks sebesar 171,4, diikuti bahan makanan (155,7) dan barang sandang (132,9).

Booming industri properti di Kota Batam cukup terindikasi dari ekspektasi konsumen yang disurvei, dimana peningkatan harga rumah yang dijual terus terjadi diiringi dengan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang masih tinggi. Dengan demikian industri properti diperkirakan masih atraktif dalam 6-12 bulan yang akan datang.

Kondisi Keuangan

Pendapatan masyarakat yang disurvei mengalami perbaikan dibandingkan 6-12 bulan yang lalu dengan nilai indeks sebesar 140,0. Hal ini diperkuat dengan relatif meningkatnya jumlah tabungan tercermin pada indeks yang mencapai 101,4.

Sebagian besar responden optimis bahwa kondisi keuangan 6-12 bulan ke depan akan mengalami peningkatan dengan indeks 122,9. Ekspektasi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan omzet usaha dan penyesuaian gaji dalam 6-12 bulan mendatang. Perbaikan pendapatan turut diikuti dengan peningkatan jumlah tabungan pada indeks 104,3.

Membaiknya kondisi keuangan masyarakat secara umum juga dapat dideteksi dari penyesuaian UMK kota Batam dari Rp 860.000 di tahun 2007 menjadi Rp960.000 pada tahun 2008. Kenaikan upah diharapkan berpengaruh positif terhadap besarnya konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mendorong perekonomian untuk lebih berakselerasi.

Rencana Konsumsi

Rencana konsumsi dari 35 responden yang disurvei masih berada pada level moderate. Konsumsi terbesar diperkirakan terjadi pada barang-barang sandang dengan indeks 157,1 dan kebutuhan tersier untuk melakukan rekreasi pada level 122,9. Sedangkan konsumsi terhadap kebutuhan akan barang-barang tahan lama seperti televisi, lemari es, furniture dan barang sejenis masih akan tertunda dicerminkan oleh indeks hanya sebesar 40,0.

Di samping itu, responden juga pesimis untuk membeli peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor serta pembelian/perbaikan rumah dalam 6-12 bulan yang akan datang, diindikasikan dengan nilai indeks masing-masing pada level 85,7; 51,4 dan 74,3.

Rendahnya tingkat konsumsi responden di tengah perbaikan tingkat pendapatan mencerminkan sikap yang sangat selektif sesuai dengan pola belanja bulanan dimana sebagian besar responden (60%) mengeluarkan Rp 1-2 juta untuk keperluan belanja per bulan.



Kondisi Ekonomi

Ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan cukup optimis di tengah tekanan situasi makro regional dan internasional, sebagaimana tercermin pada indeks ekonomi sebesar 108,6. Ketersediaan barang dan jasa diperkirakan mengalami perbaikan dengan indeks 117,1.

Dominan responden berpandangan bahwa kurs rupiah akan sedikit melemah terhadap Dollar Amerika, tercermin pada indeks sebesar 84,3. Sikap pesimisme responden juga ditunjukkan oleh indeks jumlah pengangguran saat ini (152,9) dan jumlah pengangguran dalam 6-12 bulan mendatang (135,71).

Sementara itu, ekspektasi akan adanya tingkat kenaikan suku bunga simpanan dalam 6-12 bulan yang akan datang cukup optimis dengan indeks 110,0. Secara keseluruhan, kepercayaan responden terhadap kepemimpinan pemerintah dalam 6-12 bulan mendatang cenderung pesimis, sebagaimana tercermin pada indeks prospek keberhasilan program pemerintah sebesar 95,7.

Kesimpulan

- ✚ Ekspektasi harga optimis meningkat dalam 6-12 mendatang.
- ✚ Kondisi keuangan responden mengalami perbaikan dibandingkan 6-12 bulan yang lalu dan diperkirakan meningkat seiring ekspektasi peningkatan omzet dan gaji.
- ✚ Mayoritas responden menunda pembelian barang-barang sekunder kecuali barang sandang.
- ✚ Ekspektasi terhadap kondisi ekonomi 6-12 yang akan datang cukup optimis, meski indeks ekonomi lainnya cenderung pesimis.

BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN REGIONAL

3.1. KONDISI UMUM

Kondisi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2007 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil terhadap periode sebelumnya. Beberapa indikator-indikator perbankan, seperti total aset, Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit oleh perbankan terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.

Jumlah jaringan kantor cabang bank umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 44 kantor cabang di akhir tahun 2007 meningkat dibandingkan akhir tahun 2006 yang tercatat sebanyak 40 kantor cabang. Sedangkan jumlah kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang pada akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 11 kantor pada akhir tahun 2007 meningkat menjadi 12 kantor BPR dan 1 kantor cabang BPR. Saat ini ada 6 BPR yang sedang dalam proses perizinan di Kantor Bank Indonesia Batam, 3 BPR dalam proses pengajuan izin usaha dan 3 BPR dalam proses pengajuan izin prinsip.

Total *asset*, jumlah dana masyarakat yang dihimpun serta total kredit yang diberikan oleh perbankan menunjukkan *trend* peningkatan jika dibanding triwulan III 2007. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat.

Kinerja perbankan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2007 terhitung baik, dimana *asset*, DPK, kredit dan rasio LDR menunjukkan peningkatan. Sementara itu, angka *Non Performing Loans* (NPLs) masih berada dalam batas toleransi. Pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih besar daripada penghimpunan dana menunjukkan sudah membaiknya fungsi intermediasi oleh perbankan. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan LDR pada triwulan IV 2007 sudah mulai menunjukkan peningkatan, dimana tingkat LDR bank umum pada triwulan laporan sebesar 61,06%. Peningkatan penyaluran kredit oleh dunia perbankan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dunia usaha, terutama yang pembiayaannya berasal dari perbankan.

Sementara itu, dari sisi kolektibilitas kredit juga menunjukkan indikator yang menggembirakan dimana terjadi penurunan pada tingkat NPLs di wilayah kerja KBI Batam, yaitu dari 3,47% pada triwulan III 2007 menjadi 2,60% pada triwulan laporan. Penurunan NPLs tersebut terutama disumbangkan dari tingkat NPLs perbankan di daerah Batam dan Tanjung

Pinang. Penurunan total nilai NPL di wilayah kerja KBI Batam ini dipengaruhi oleh performa dunia usaha yang sudah mulai membaik.

Secara geografis, dana simpanan yang masuk ke dunia perbankan di wilayah kerja KBI Batam porsi terbesar berasal dari kota Batam sebesar Rp9,21 triliun atau 67,80% dari seluruh dana masyarakat yang berhasil dihimpun di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pula kredit yang disalurkan oleh perbankan sebagian besar mengalir ke kota Batam sebesar Rp6,82 triliun atau 82,98% dari seluruh total kredit yang disalurkan ke masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

TABEL 3.1 – PERKEMBANGAN INDIKATOR BANK UMUM

(juta rupiah)

Indikator	Periode				
	2006			2007	
	Tw.IV	Tw.I	Tw. II	Tw. III	Tw.IV
1. Jaringan BU	40	40	41	44	44
a. Batam	26	27	27	28	28
b. Tj. Pinang	11	11	11	13	13
c. Karimun	2	2	2	2	2
d. Natuna	1	1	1	1	1
2. Total Asset	14.592.742	14.617.078	15.106.938	15.851.731	16.000.135
a. Batam	9.966.611	10.181.336	10.478.486	11.155.797	11.404.510
b. Tj. Pinang	3.511.073	3.320.778	3.730.356	3.897.759	3.787.352
c. Dati II lain	1.115.058	1.114.964	898.096	798.175	492.979
3. Total DPK	12.420.268	12.462.137	12.795.065	13.497.036	13.586.189
a. Batam	7.979.175	8.159.309	8.323.007	8.951.957	9.210.896
b. Tj. Pinang	3.352.073	3.182.499	3.562.510	3.726.971	3.597.598
c. Dati II lain	1.089.020	443.931	909.548	818.108	101.417
4. Total Kredit	6.666.355	6.713.064	7.228.680	7.726.078	8.215.755
a. Batam	5.588.850	5.622.513	6.025.843	6.374.627	6.817.304
b. Tj. Pinang	897.686	898.102	985.475	1.111.212	1.139.982
c. Dati II lain	179.819	192.449	217.362	240.239	185.294
5. LDR (%)	53,67	53,87	56,50	57,24	60,47
a. Batam	70,04	68,91	72,40	71,21	74,01
b. Tj. Pinang	26,78	28,22	27,66	29,82	31,69
c. Karimun	39,10	33,11	36,62	35,16	38,24
d. Natuna	5,04	6,72	11,75	20,58	24,96
6. NPLs (%)	4,34	4,46	4,28	3,47	2,60
a. Batam	4,43	4,19	4,01	3,16	2,37
b. Tj. Pinang	3,66	5,95	5,87	5,18	3,72
c. Karimun	5,98	6,86	6,28	8,48	5,43
d. Natuna	0,00	0,00	0,07	0,06	0,00

Sumber : Bank Indonesia

3.2. TOTAL ASSET BANK UMUM

Kondisi industri perbankan menunjukkan pertumbuhan, seperti tercermin pada pertumbuhan total *asset* bank umum yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam yang didukung oleh pertumbuhan aktiva produktif, termasuk kredit. Sampai dengan triwulan akhir 2007, total *asset* bank umum mencapai Rp16 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 0,94% dibanding triwulan II 2007 yang tercatat sebesar Rp 15,85 triliun, sedangkan secara tahunan (y-o-y) terdapat peningkatan sebesar Rp1,4 triliun (9,64%).

Berdasarkan Dati II, kegiatan perekonomian dan perbankan masih terkonsentrasi di Kota Batam, dimana jumlah total *asset* perbankan sebagian besar masih tetap terhimpun di Kota Batam. Total *asset* perbankan yang ada di Kota Batam pada triwulan IV 2007 sebesar Rp11,40 triliun atau 71,28% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sedangkan total *asset* yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Tanjung Pinang sebesar Rp3,89 triliun atau 23,67% dari seluruh total *asset* perbankan di Kepulauan Riau. Sementara itu total *asset* perbankan di wilayah Kepulauan Riau (Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, dan Natuna) sebesar Rp808 miliar (5,05%).

TABEL 3.2 – PERKEMBANGAN TOTAL ASSET PERBANKAN

(miliar rupiah)

Lokasi	2006	2007			
	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4
Kota Batam	9.967	10.181	10.478	11.156	11.404
Wil.Tj.Pinang	3.511	3.321	3.730	3.898	3.787
Kep. Riau*)	1.115	1.115	898	798	808
Total	14.593	14.617	15.106	15.851	16.000

Sumber : Bank Indonesia

*) wilayah Kepulauan Riau meliputi Tj.Uban., Tanjung Balai Karimun dan Kab. Natuna

Total *asset* perbankan di Kota Batam mengalami peningkatan sebesar 2,22% secara triwulanan (qtq) sedangkan secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 14,42%. Sedangkan untuk total *asset* perbankan di wilayah Kota Tanjung Pinang mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,85%, namun secara tahunan meningkat sebesar 7,86%. Untuk perbankan di wilayah Kepulauan Riau yang meliputi Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun dan Natuna, total *asset* perbankan di wilayah tersebut mengalami penurunan baik triwulanan maupun tahunan masing-masing sebesar 11,13% dan 27,53%.

3.3. DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM

Sampai dengan tahun 2007, jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank Umum terus mengalami pertumbuhan, dimana pada triwulan akhir 2007 jumlah dana masyarakat mencapai Rp13,59 triliun atau meningkat tipis sebesar Rp89 milyar (0,66%) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp13,49 triliun.

Dibandingkan dengan triwulan III 2007 tabungan merupakan jenis simpanan yang mengalami pertumbuhan terbesar yang mencapai 15,73% (Rp677 miliar). Namun peningkatan pada jenis simpanan tabungan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan dua jenis simpanan yang lain. Jenis simpanan dalam bentuk giro mengalami penurunan 4,89% (Rp296 miliar) sedangkan simpanan dalam bentuk deposito menurun 9,30% (Rp291 miliar). Penurunan

simpanan deposito di akhir tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh penarikan rekening deposito pemerintah terkait dengan tutup buku tahun 2007. Selain itu penurunan suku bunga deposito oleh perbankan sebagai respon atas penurunan suku bunga SBI juga ikut mempengaruhi penurunan simpanan masyarakat dalam bentuk deposito.

Trend perkembangan dana yang dapat dihimpun oleh bank umum yang berada di wilayah kerja KBI Batam dari triwulan IV 2006 sampai dengan triwulan IV 2007 dapat dilihat tabel 3.5.

TABEL 3.3 – PENGHIMPUNAN DANA BANK UMUM

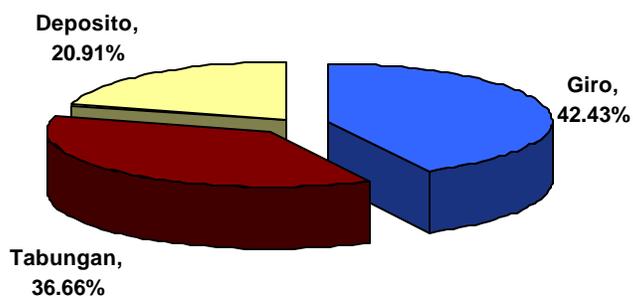
(Juta Rupiah)

Keterangan	2006	2007			
	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4
- Giro	5.086.038	5.057.691	5.602.987	6.061.732	5.765.020
- Tabungan	3.828.176	3.844.020	3.999.732	4.303.432	4.980.529
- Deposito	3.506.054	3.560.426	3.196.346	3.131.872	2.840.640
Total	12.420.268	12.462.137	12.795.065	13.497.036	13.586.189

Sumber : Bank Indonesia Batam

Meskipun demikian, secara nominal simpanan giro masih memiliki porsi terbesar sebesar 42,43%. Kemudian diikuti tabungan dan deposito masing-masing sebesar 36,66% dan 20,91%.

GRAFIK 3.1 – PERBANDINGAN TOTAL DPK BANK UMUM TRIWULAN IV 2007



Dominasi sektor industri dan sektor perdagangan pada perekonomian Kota Batam turut mempengaruhi jenis transaksi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau. Kebutuhan masyarakat akan dana likuid serta transaksi ekonomi yang membutuhkan waktu singkat menyebabkan simpanan berbentuk giro memiliki porsi terbesar terhadap total simpanan masyarakat di perbankan.

Sumber : Bank Indonesia Batam.

3.3. KREDIT BANK UMUM

Jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam pada triwulan IV 2007 meningkat sebesar Rp1,54 triliun atau tumbuh sebesar 23,24% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2006 (yoy). Peningkatan penyaluran kredit tersebut dipengaruhi oleh target penyaluran kredit bank yang menjelang akhir tahun harus dipenuhi,

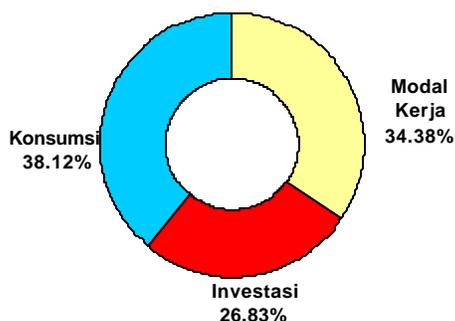
sehingga upaya penyaluran kredit oleh perbankan lebih gencar dibandingkan dengan periode semester awal tahun 2007. Selain itu, penurunan suku bunga BI Rate yang secara gradual menurun dari awal tahun hingga posisi saat ini sebesar 8,00% ikut mempengaruhi tingginya pertumbuhan kredit perbankan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan triwulan III 2007, kredit yang disalurkan oleh Bank Umum meningkat sebesar Rp489 miliar (6,34%). Jumlah penyaluran kredit oleh Bank Umum pada triwulan laporan meningkat terhadap triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Hal tersebut berdampak pada peningkatan tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Umum yaitu dari 57,24% (triwulan III 2007) menjadi 60,47% (triwulan IV 2007).

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit yang disalurkan di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar digunakan untuk kredit konsumsi sebesar Rp3,13 triliun atau 38,12% dari total kredit yang diberikan. Sedangkan kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing sebesar Rp2,93 triliun (35,65%) dan Rp2,16 triliun (26,24%).

Dari segi pertumbuhan, peningkatan jumlah kredit terbesar pada triwulan IV 2007 terdapat pada kredit untuk jenis kredit modal kerja yang meningkat sebesar Rp272 miliar atau 10,25%

**GRAFIK 3.2
KOMPOSISI PENYALURAN KREDIT**



Sumber : Bank Indonesia Batam

terhadap triwulan III 2007. Sementara itu kredit konsumsi meningkat sebesar Rp134 miliar (4,48%). Sedangkan kredit investasi meningkat sebesar Rp83 miliar (4,00%). Peningkatan pembiayaan kredit modal kerja dan kredit investasi oleh bank umum menunjukkan bahwa dunia usaha di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mulai tumbuh dengan baik.

Meskipun *share* kredit menurut jenis penggunaan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh kredit konsumsi, namun dari segi pertumbuhan kredit modal kerja menunjukkan peningkatan yang jauh lebih tinggi dengan trend yang terus meningkat. Hal ini memberikan gambaran bahwa kegiatan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Riau yang dibiayai oleh perbankan mulai menunjukkan kinerja yang terus meningkat.

TABEL 3.4 – PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT BANK UMUM*(miliar rupiah)*

KETERANGAN	2006	2007			
	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
- Modal kerja	2.366.633	2.303.606	2.486.151	2.656.218	2.928.587
- Investasi	1.758.377	1.764.400	1.894.140	2.072.646	2.155.566
- Konsumsi	2.541.345	2.645.058	2.848.389	2.997.214	3.131.602
Total	6.666.355	6.713.064	7.228.680	7.726.078	8.215.755

Sumber : Bank Indonesia Batam

NPL bank umum di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2007 menunjukkan indikator yang menggembirakan. NPL bank umum menurun dari 3,47% pada triwulan III 2007 menjadi 2,60% di triwulan akhir tahun 2007. Secara nominal NPL bank umum sedikit meningkat menjadi sebesar Rp1,11 triliun. Meskipun secara nominal meningkat, namun karena penyaluran kredit yang disalurkan oleh perbankan meningkat lebih besar dibandingkan dengan peningkatan nominal NPL, maka rasio NPLs perbankan di wilayah kerja KBI Batam mengalami penurunan.

TABEL 3.5 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT*(miliar rupiah)*

KETERANGAN	2006	2007			
	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Total	6.666.355	6.713.064	7.228.680	7.726.078	8.215.755
- Lancar	5.658.971	5.658.159	6.179.304	6.616.103	7.242.850
- Dalam Perhatian Khusus	718.327	755.618	739.891	841.514	759.171
- Kurang Lancar	51.033	43.591	91.848	41.766	25.161
- Diragukan	28.018	38.974	46.772	34.427	25.540
- Macet	210.006	216.722	170.865	192.268	163.033
>> NPL (Nominal)	289.057	299.287	309.485	268.461	213.734
>> NPL (%)	4,34	4,46	4,28	3,47	2,60

Sumber : Bank Indonesia Batam

3.5. TOTAL ASSET DAN DPK BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Total asset BPR yang berada di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Batam mengalami peningkatan. Sampai dengan triwulan IV 2007, total asset BPR mengalami peningkatan sebesar Rp35,49 miliar (5,97%) menjadi sebesar Rp628,81 miliar dibanding triwulan III 2007 yang tercatat sebesar Rp 593,38 miliar.

Total dana yang berhasil dihimpun oleh BPR pada triwulan laporan meningkat dengan triwulan sebelumnya. Jika pada triwulan III 2007 total dana yang dihimpun BPR tercatat sebesar Rp461,03 miliar, maka pada triwulan IV 2007 meningkat menjadi Rp476,11 miliar, atau naik sebesar Rp15,08 miliar (3,27%) dan secara tahunan (yoy) meningkat Rp142,73 miliar (42,81%).

Sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun oleh BPR disimpan dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp437,528 miliar atau 91,90% dari seluruh total DPK BPR. Sedangkan 8,10% disimpan dalam bentuk tabungan sebesar Rp38,58 miliar. Komposisi ini searah dengan komposisi simpanan dana masyarakat di Bank Umum dimana komposisi simpanan dalam bentuk deposito lebih besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk tabungan.

TABEL 3.6 – PERKEMBANGAN TOTAL ASSET DAN DPK BPR

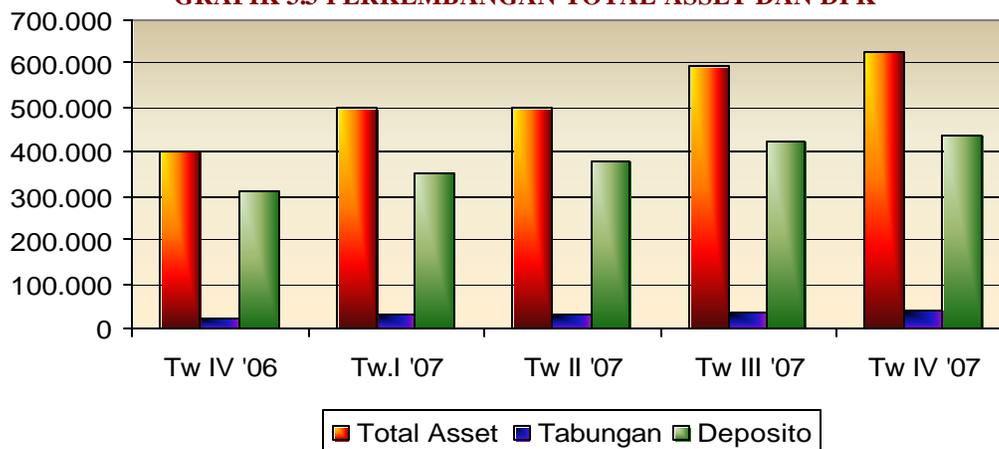
(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006		2007		
	Tw IV	Tw.I	Tw II	Tw III	Tw IV
1. TOTAL ASSET	399.081	497.396	498.558	593.383	628.812
2. TOTAL DANA	333.379	381.654	410.714	461.030	476.104
a. Tabungan	21.672	29.252	30.792	35.791	38.577
b. Deposito	311.707	352.402	379.922	425.239	437.528

Sumber: Bank Indonesia Batam

Sebagian besar dana masyarakat yang dihimpun oleh BPR disimpan dalam bentuk deposito yaitu sebesar Rp437,528 miliar atau 91,90% dari seluruh total DPK BPR. Sedangkan 8,10% disimpan dalam bentuk tabungan sebesar Rp38,58 miliar. Komposisi ini searah dengan komposisi simpanan dana masyarakat di Bank Umum dimana komposisi simpanan dalam bentuk deposito lebih besar dibandingkan dengan simpanan dalam bentuk tabungan.

GRAFIK 3.3 PERKEMBANGAN TOTAL ASSET DAN DPK



3.6. KREDIT BPR

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR kepada masyarakat pada triwulan IV 2007 meningkat terhadap triwulan III 2007. Jumlah kredit yang diberikan oleh BPR yang beroperasi di wilayah kerja KBI Batam pada triwulan akhir 2007 sebesar Rp370,59 miliar atau meningkat

Rp22,15 miliar (6,36%) dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp348,44 miliar. Peningkatan penyaluran kredit oleh BPR juga diikuti kenaikan angka kredit bermasalah (NPLs). Jika pada triwulan III 2007 angka NPL BPR di wilayah kerja KBI Batam adalah 0,78% maka pada triwulan akhir tahun 2007 angka tersebut meningkat menjadi sebesar 1,31%. Peningkatan angka NPLs ini masih berada di bawah angka toleransi 5%. Peningkatan NPLs BPR tersebut harus menjadi warning bagi pengurus BPR untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit dan terus melakukan pemantauan pasca pemberian kredit.

TABEL 3.7 – PERKEMBANGAN KOLEKTIBILITAS KREDIT BPR

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006			2007	
	Tw IV	Tw.I	Tw II	Tw III	Tw IV
Total Kredit	218.224	266.329	306.565	348.435	375.622
Lancar	215.897	264.319	303.841	345.729	370.715
Kurang Lancar	1.517	1.024	1.551	1.906	2.312
Di ragukan	591	771	877	316	2.358
Macet	219	215	296	486	235

Sumber: Bank Indonesia Batam

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR di wilayah kerja KBI Batam sebagian besar digunakan untuk keperluan konsumsi. Kredit untuk konsumsi yang disalurkan BPR di wilayah kerja KBI Batam pada triwulan IV 2007 tercatat sebesar Rp258,89 miliar atau 69,86% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sementara kredit untuk modal kerja yang diberikan BPR di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp84,19 miliar atau 22,72% dari seluruh total kredit yang diberikan oleh BPR. Sedangkan untuk kredit investasi sebesar Rp27,51 miliar (7,42%).

Besarnya kredit BPR untuk keperluan konsumsi mencerminkan intermediasi yang dilakukan BPR terhadap dunia usaha masih belum optimal. Sebagian besar BPR di Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan kredit untuk keperluan pembelian mobil dan beberapa untuk pembelian rumah atau ruko.

**TABEL 3.8 – PERKEMBANGAN KREDIT BPR
MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA**

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2006	2007			
	Tw IV	Tw.I	Tw II	Tw III	Tw IV
Total Kredit	218.224	266.329	306.565	348.435	370.558
a. Modal Kerja	18.646	20.355	20.320	22.119	27.510
b. Investasi	54.481	66.135	72.505	82.152	84.193
c. Konsumsi	145.097	179.839	213.740	244.164	258.884

Sumber: Bank Indonesia Batam

Meskipun secara share, kredit BPR di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh kredit konsumsi, namun meskipun kredit investasi memiliki porsi terkecil, kredit investasi mengalami peningkatan terbesar di antara dua jenis kredit yang lain. Kredit investasi meningkat sebesar 24,37% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu kredit konsumsi meningkat sebesar 6,03% dan kredit modal kerja meningkat sebesar 2,49%. Peningkatan kredit investasi BPR yang cukup tinggi ini memberikan sinyal positif bagi dunia usaha, khususnya UMKM, mengingat pangsa pasar BPR adalah usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB 4 PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

4.1. KONDISI UMUM

Otonomi daerah telah memberikan momentum bagi daerah untuk mengoptimalkan pembangunan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah telah banyak melakukan terobosan terkait dengan sumber dana pembangunan maupun prioritas pembangunan. Berbagai upaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan lapangan kerja baru.

Dalam kerangka otonomi daerah telah jelas ditegaskan bahwa masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang diharapkan akan mampu menggerakkan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sebagai provinsi yang sedang melaksanakan pembangunan, kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangatlah tergantung pada kemampuan Anggaran Daerah yang dicerminkan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 (enam) Kota/Kabupaten, yaitu : Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Kondisi umum Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan perkembangan yang positif yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan masing-masing komponen Pendapatan Daerah yang meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari semua penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah.

Adapun landasan hukum yang digunakan adalah Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dijelaskan

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Mengacu pada landasan hukum tersebut, maka rincian APBD adalah sebagai berikut :

A. Anggaran Pendapatan

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan (Perolehan atas Laba pada Penyertaan Modal BUMD)
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

II. Dana Perimbangan, terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pajak Penghasilan Perorangan (PPH)
2. Bagi Hasil Bukan Pajak :
 - a. Sumber Daya Alam (SDA) yang sumber penerimaannya diperoleh dari Landrent, Royalti dan sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

C. Lain – lain Pendapatan yang Sah :

1. Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan lainnya

B. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

C. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

PAD menjadi salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berasal dari potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan Dana Desentralisasi Pemerintah Pusat, dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi Daerah.

TABEL 4.1 - PERKEMBANGAN APBD PROVINSI KEPRI TAHUN 2005-2007

No	STRUKTUR APBD	TA. 2005	TA. 2006		TA. 2007	
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	± (%)	Jumlah (Rp.)	± (%)
1.	PENDAPATAN	371.721.840.000	911.152.768.000	145,12	1.019.498.530.494	11,90
2.	BELANJA	483.577.930.500	1.136.081.909.773	134,93	1.459.367.000.000	28,46
3.	PEMBIAYAAN	111.856.090.500	224.929.141.773	101,09	439.868.869.506	95,56
Perkembangan APBD		501.134.743.000	1.189.966.909.773	137,45	1.467.000.000.000	23,28

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

APBD provinsi Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Secara umum, APBD tahun 2007 meningkat 23,28% dibandingkan tahun anggaran 2006 menjadi Rp1,47 triliun. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen pembiayaan naik 95,56% diikuti oleh peningkatan anggaran belanja sebesar 28,46%. Sedangkan penerimaan daerah naik 11,90% menjadi sekitar Rp1,02 triliun pada tahun 2007. Meningkatnya anggaran pengeluaran pemerintah tidak terlepas dari tumbuhnya perekonomian di provinsi Kepulauan Riau, sehingga menuntut pemerintah untuk meningkatkan investasinya guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.

4.2. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2007

Secara umum kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 mengalami peningkatan. Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah antara lain kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa realisasi penerimaan provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 melampaui target yang direncanakan dengan rasio 100,01%. Namun demikian, besarnya penerimaan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja aparat pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya daerah yang ada. Hal tersebut tercermin dari tidak tercapainya realisasi PAD dengan rasio 99,81%. Penerimaan terendah pada komponen retribusi izin usaha periklanan dengan tingkat realisasi hanya 64,40% dari target.

Di samping itu, tingginya realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah yakni 118,6% berasal dari penerimaan jasa giro (102,4%) dan P. Jasa Raharja (153,56%) menunjukkan penerimaan bukan berasal dari sektor-sektor produktif (riil) yang mendukung pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Keadaan ini dapat juga disebabkan karena kurang realistisnya target penerimaan yang dicanangkan terhadap kemampuan aparat pemerintah dalam pelaksanaannya di lapangan.

**TABEL 4.2 - TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2007**

JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN TH. 2007	REALISASI PENERIMAAN			% PENCAPAIAN TARGET
		DES-2007 JUMLAH (Rp.)	s/d. NOV -2007 JUMLAH (Rp.)	s/d. DES-2007 JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN	1,019,498,530,494.00	188,418,638,081.76	831,148,715,910.47	1,019,567,353,992.23	100.01
PENDAPATAN ASLI DAERAH	325,531,079,192.00	30,179,966,704.76	294,719,131,744.07	324,899,098,448.83	99.81
PAJAK DAERAH	305,450,788,000.00	25,901,796,407.00	275,518,313,018.00	301,420,109,425.00	98.68
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	131,990,294,000.00	12,202,907,169.00	112,758,628,538.00	124,961,535,707.00	94.67
Pajak Kendaraan Di Air	-	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	81,591,950,000.00	4,657,349,800.00	78,931,103,496.00	83,588,453,296.00	102.45
Bea Balik Nama Kendaraan Di Air	-	-	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	90,368,544,000.00	8,991,735,534.00	82,570,808,078.00	91,562,543,612.00	101.32
Pajak Air Permukaan	1,500,000,000.00	49,803,904.00	1,257,772,906.00	1,307,576,810.00	87.17
RETRIBUSI DAERAH	485,000,000.00	19,062,000.00	325,160,000.00	344,222,000.00	70.97
Retribusi Jasa Usaha	485,000,000.00	19,062,000.00	325,160,000.00	344,222,000.00	70.97
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	110,000,000.00	9,302,000.00	93,424,500.00	102,726,500.00	93.39
Retribusi Tera Ulang (Disperindag)	60,000,000.00	9,302,000.00	67,464,500.00	76,766,500.00	127.94
Retribusi LPMHP (Dinas Perikanan dan Kelautan)	50,000,000.00	-	25,960,000.00	25,960,000.00	51.92
Retribusi Izin Usaha Periklanan	375,000,000.00	9,760,000.00	231,735,500.00	241,495,500.00	64.40
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	19,595,291,192.00	4,259,108,297.76	18,875,658,726.07	23,134,767,023.83	118.06
Jasa Giro	18,727,391,192.00	533,610,847.76	18,643,336,926.07	19,176,947,773.83	102.40
Sumbangan Pihak Ketiga	867,900,000.00	25,497,450.00	232,321,800.00	257,819,250.00	29.71
PT Jasa Raharja	167,900,000.00	25,497,450.00	232,321,800.00	257,819,250.00	153.56
Pengelola Pelabuhan Udara dan Laut (Dinas Perhubungan)	700,000,000.00	-	-	-	-
Penerimaan Lain-lain	-	3,700,000,000.00	-	3,700,000,000.00	-
DANA PERIMBANGAN	663,967,451,302.00	155,238,671,377.00	509,429,584,166.40	664,668,255,543.40	100.11
BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	330,637,451,302.00	127,460,921,377.00	203,874,340,166.40	331,335,261,543.40	100.21
BAGI HASIL PAJAK	155,847,988,000.00	51,866,564,673.00	109,885,293,349.00	161,751,858,022.00	103.79
Pajak Bumi dan Bangunan	99,743,508,000.00	29,347,632,910.00	69,806,192,030.00	99,153,824,940.00	99.41
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,904,480,000.00	1,714,368,745.00	12,318,847,786.00	14,033,216,531.00	141.69
Pajak Penghasilan Orang Pribadi	46,200,000,000.00	20,804,563,018.00	27,760,253,533.00	48,564,816,551.00	105.12
BAGI HASIL BUKAN PAJAK /					
SUMBER DAYA ALAM	174,789,463,302.00	75,594,356,704.00	93,989,046,817.40	169,583,403,521.40	97.02
Landrent/Deadrent	507,786,279.00	307,928,182.00	620,991,022.40	928,919,204.40	182.94
Iuran Eksploitasi (Royalti)	6,088,770,000.00	613,545,691.00	5,491,913,032.00	6,105,458,723.00	100.27
Minyak Bumi	107,794,983,322.00	37,602,549,003.00	46,888,860,622.00	84,491,409,625.00	78.38
Gas Alam	60,397,923,701.00	37,070,333,828.00	40,987,282,141.00	78,057,615,969.00	129.24
DANA ALOKASI UMUM	333,330,000,000.00	27,777,750,000.00	305,555,244,000.00	333,332,994,000.00	100.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30,000,000,000.00	3,000,000,000.00	27,000,000,000.00	30,000,000,000.00	100.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30,000,000,000.00	3,000,000,000.00	27,000,000,000.00	30,000,000,000.00	100.00
Dana Penyesuaian	30,000,000,000.00	3,000,000,000.00	27,000,000,000.00	30,000,000,000.00	100.00
Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya	30,000,000,000.00	3,000,000,000.00	27,000,000,000.00	30,000,000,000.00	100.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

4.3. PERMASALAHAN UTAMA PENDAPATAN DAERAH

Di dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah, masih terdapat permasalahan – permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Belum tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat dan pihak swasta untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, sehingga hal ini membawa dampak terhadap optimalisasi potensi realisasi penerimaan Pendapatan Daerah,
2. Akurasi data potensi PAD yang senantiasa perlu di perbaharui, dan
3. Kurangnya koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat khususnya yang berkenaan dengan teknis setoran penerimaan Dana Perimbangan ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.4. RENCANA PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2008

Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 direncanakan sebesar **Rp. 1.178.500.000.000**. Jumlah ini menunjukkan peningkatan 5,66% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun 2007 atau naik 15,60 % dari target Pendapatan Daerah pada APBD-Perubahan Tahun 2007. Sedangkan nilai APBD yang baru disahkan menjadi Perda APBD 2008 senilai Rp1,389 triliun, turun Rp41 miliar dari pengusulan awal nota anggaran yang sebesar Rp1,43 triliun. Penyusutan akibat turunnya tiga surat SK Menteri Keuangan yang mengatur tentang DBH Pertambangan Migas. Nilai APBD tahun 2008 ini juga jauh menurun dari APBD-Perubahan 2007 yang sebesar Rp1,56 triliun.

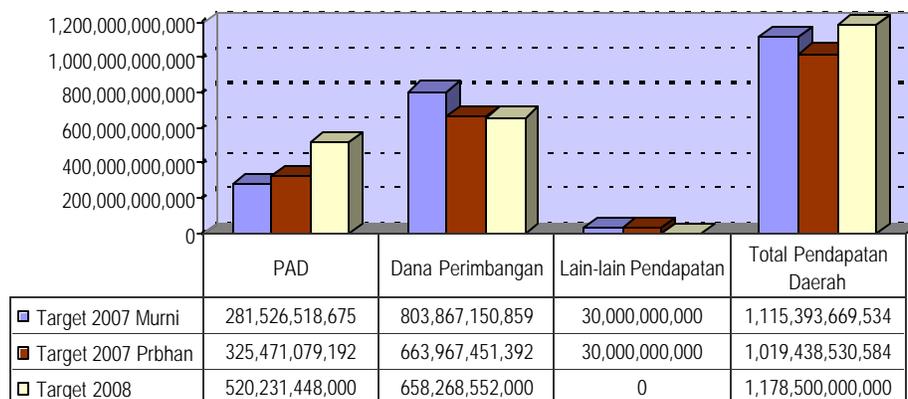
Penerimaan terbesar diperkirakan berasal dari Dana Perimbangan yaitu direncanakan sebesar Rp. 658.268.552.000 atau turun 18,11 % dibandingkan target APBD Murni tahun 2007 atau menurun 0,86 % dari APBD-P Tahun 2007. Selanjutnya, penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan juga memberikan kontribusi yang signifikan sebesar Rp. 520.231.448.000. Jumlah ini meningkat sebesar 84,79 % dari target APBD Murni Tahun 2007 atau naik 59,84 % dari rencana penerimaan pada APBD-P Tahun 2007. Sedangkan estimasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang syah Tahun 2008 diperkirakan tidak ada alokasi dana *ad hoc* untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah

periode Januari s/d Desember 2007 melampaui target yang direncanakan dengan rasio sebesar 100,01%.

Apabila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor penerimaan terhadap total rencana penerimaan Pendapatan daerah Tahun 2008 sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,14 %,
- (2) Dana Perimbangan sebesar 55,86 %, dan
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memberikan kontribusi dalam Pendapatan Daerah tahun 2008.

GRAFIK 4.1 – PERKEMBANGAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2007 DAN RENCANA 2008



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

4.4.1. Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber keuangan Pemerintah Daerah memiliki peranan penting mengingat adanya keterbatasan keuangan negara (APBN) dalam membantu membiayai pembangunan di daerah. Atas dasar tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Penerimaan PAD dalam APBD dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Pada Tahun Anggaran 2008, komponen penerimaan dari PAD tetap menunjukkan trend kenaikan seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian Indonesia pada umumnya dan provinsi Kepulauan Riau pada khususnya. Hal tersebut juga disebabkan terus dilaksanakannya perbaikan-perbaikan pelayanan dan administrasi pembayaran pajak PKB dan BBN-KB oleh Kantor Bersama Samsat, selain itu adanya

kebijakan – kebijakan yang diambil oleh Pemerintah provinsi Kepulauan Riau untuk lebih memaksimalkan potensi dari Retribusi Daerah dan Sumbangan Pihak Ketiga untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PAD.

Dalam APBD tahun 2008 direncanakan penerimaan sektor PAD sebesar Rp520.231.448.000. Jumlah ini menunjukkan peningkatan 84,79% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun 2007 atau naik 59,84% dari rencana penerimaan pada APBD-Perubahan Tahun 2007. Penerimaan terbesar direncanakan bersumber dari PKB dan BBN-KB yang memberikan kontribusi sebesar Rp310.786.350.000 atau 59,74% dari total PAD Tahun 2008. Realisasi penerimaan PAD periode Januari s/d Desember 2007 sebesar Rp324.899.098.448 atau mencapai 99,81% dari target yang telah ditetapkan pada APBD-P Tahun Anggaran 2007.

Hal – hal yang menjadi dasar peningkatan penerimaan PAD khususnya dari sektor PKB, BBN-KB dan PBB-KB pada RAPBD Tahun 2008 adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar rata-rata 10% per tahun mengingat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan.
2. Dilakukannya penyempurnaan sistem pemungutan BBN-KB khususnya BBN-KB ke 2. salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memberikan kebijakan pengurangan (discount) biaya BBN-KB I yang diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat (WP) dalam membayar BBN-KB II tersebut.
3. Sedangkan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), diharapkan juga mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang berdampak pada peningkatan konsumsi BBM. Selain itu dengan kebijakan baru menerapkan pungutan PBB-KB untuk kendaraan di atas air dan sektor industri juga diharapkan dapat memberikan dampak dalam peningkatan penerimaan PBB-KB pada Tahun 2008.
4. Adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dispenda Provinsi Kepulauan Riau.
5. Adanya pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah, diharapkan menambah legitimasi hukum dalam pemungutan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.4.2. Rencana Retribusi Daerah

Estimasi penerimaan pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp8.140.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp8.140.000.000 atau 1.578,3% dari tahun sebelumnya Rp485.000.000. Adapun realisasi penerimaan Retribusi Daerah untuk periode Januari s/d Desember 2007 sebesar Rp344.222.000 atau 98,68% dari target yang ditetapkan. Bahwa mulai tahun 2008, merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan didukung oleh DPRD prov. Kepri bahwa masing-masing SKPD dapat memberikan kontribusinya kepada penerimaan PAD. SKPD diharapkan mulai merencanakan program kerja yang berorientasi pada penerimaan PAD (profit oriented) dan tentunya dengan tetap berpedoman pada aspek hukum ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan/prioritas aspek pelayanan publik kepada masyarakat. Rincian peningkatan target penerimaan bersumber dari:

a. Retribusi Jasa Usaha : Pemakaian Kekayaan Daerah

Estimasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha : Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp250.000.000. Atau naik sebesar 400% dari tahun sebelumnya Rp50.000.000. Adapun Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah periode Januari s/d Desember 2007 sebesar Rp102.726.500 atau mencapai 93,39% dari target yang ditetapkan. Penerimaan tersebut bersumber dari hasil pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah berupa assets yang dikelola oleh Satuan Unit Kerja Dinas Pertanian.

b. Retribusi Jasa usaha : Perikanan

Estimasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Perikanan pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp750.000.000 atau naik sebesar 100% dari tahun sebelumnya Rp375.000.000. Realisasi penerimaan periode Januari s/d Desember 2007 sebesar Rp241.495.500 atau mencapai 64,40%. Penerimaan Retribusi dimaksud bersumber dari retribusi pemasaran hasil perikanan dan perizinan dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perikanan.

c. Retribusi Jasa Umum : Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Estimasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tera dan Tera Ulang pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp640.000.000 atau naik sebesar 966% dari tahun sebelumnya Rp60.000.000 . Realisasi penerimaan periode Januari s /d Desember

2007 sebesar Rp76.766.500 atau mencapai 127,94%. Penerimaan Retribusi dimaksud dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

d. Retribusi Jasa Umum : Rumah Sakit Umum Tj. Uban

Estimasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Pengelolaan Rumah Sakit Umum Tanjung Uban pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp1.000.000.000 dimana tahun sebelumnya belum ditargetkan mengingat operasional RSU baru efektif melayani masyarakat mulai tahun 2008. Penerimaan Retribusi dimaksud dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

e. Retribusi Jasa Umum : Retribusi Pertanian, Peternakan dan kehutanan

Estimasi penerimaan Retribusi yang berasal dari Pertanian, Peternakan dan Kehutanan pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp500.000.000 dimana tahun sebelumnya belum ditargetkan. Retribusi ini nantinya diupayakan berasal dari pelayanan dikelola oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

f. Retribusi Jasa Umum : Jasa Ketatausahaan

Estimasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Ketatausahaan pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000 dimana tahun sebelumnya belum ditargetkan. Retribusi ini nantinya diupayakan berasal dari pelayanan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4.4.3. Rencana Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Estimasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2008 diproyeksikan sebesar Rp58.261.283.000 meningkat sebesar Rp38.665.991.808 atau 197,32% dari tahun sebelumnya Rp19.595.291.192. Adapun realisasi penerimaan untuk periode Januari s/d Desember 2007 sebesar Rp23.134.767.023 atau mencapai 118,06% dari target yang ditetapkan.

Adapun upaya peningkatan Retribusi Daerah, secara umum dapat disampaikan bahwa objek Retribusi Daerah merupakan kompensasi yang dibayar oleh masyarakat akibat adanya pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah. Di masa yang akan datang,

Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi yang sedang berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana diharapkan dapat membangun sarana yang nantinya dapat dijadikan sebagai objek Retribusi Daerah Provinsi, antara lain : Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Retribusi Uji Emisi Kendaraan, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

4.4.3. Rencana Dana Perimbangan

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2008 direncanakan sebesar Rp658.268.552.000. Apabila dibandingkan target penerimaan pada APBD Perubahan Tahun 2007 sebesar Rp663.967.451.302 maka terlihat adanya penurunan target penerimaan sebesar Rp5.698.899.302 atau menurun 0,86% dari target Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan periode Januari s/d Desember 2007 sebesar Rp664.668.255.543 atau 100,11% dari target yang ditetapkan.

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2008 bersumber dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp156.882.237.000 mengalami peningkatan sebesar Rp1.034.249.000 atau naik 0,66% dari target APBD-P tahun 2007. Sedangkan estimasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) pada Tahun 2008 sebesar Rp206.700.457.000 mengalami peningkatan sebesar Rp31.910.993.698 atau naik 18,26% dari target APBD-P tahun 2007. Perkiraan penerimaan DBH Migas khususnya sektor minyak bumi untuk tahun 2008 sudah disesuaikan dengan perkembangan produksi (lifting) dan harga minyak bumi di pasaran internasional. Selanjutnya, Estimasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2008 direncanakan sebesar Rp288.884.858.000 atau mengalami penurunan sebesar Rp44.445.142.000,- atau turun 13,33%.

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) terdiri dari Landrent, Royalty pertambangan dan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam. Estimasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2008 sebesar Rp206.700.457.000 mengalami peningkatan sebesar Rp31.910.993.698 atau naik 18,26% dari target tahun APBD-P 2007 sebesar Rp174.789.463.302. Realisasi penerimaan periode Januari – Desember 2007 sebesar Rp169.583.403.521 atau 97,02% dari target yang ditetapkan.

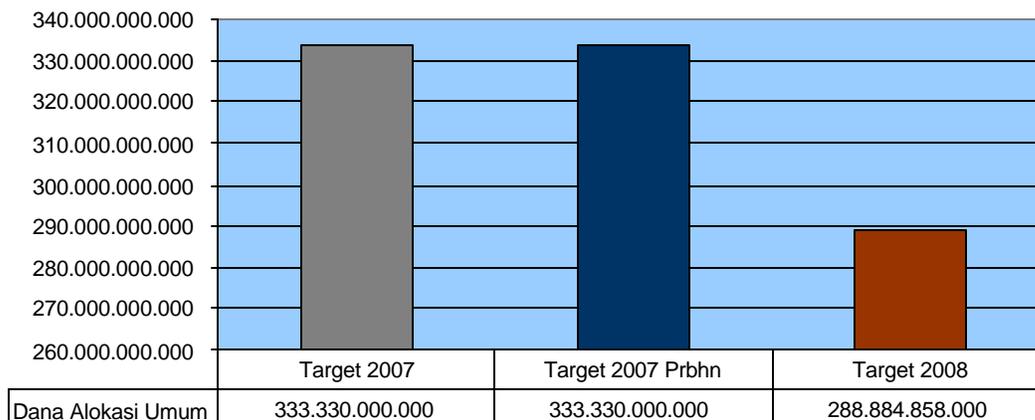
4.4.3. Rencana Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan APBN pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 26% dari total belanja APBN tahun berjalan. DAU tersebut digunakan sebagai "buffer/penyangga" kebutuhan fiskal/pembiayaan daerah dalam melakukan aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Estimasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp288.884.858.000 mengalami penurunan sebesar Rp44.445.142.000 atau turun 13,33% dari target tahun 2007 sebesar Rp333.330.000.000.

Penurunan DAU Prov. Kepri pada Tahun 2008 merupakan salah satu akibat dari adanya kebijakan Pemerintah yang sudah tidak lagi menerapkan kebijakan "Hold Harmless", dimana DAU Thn. 2008 lebih besar dari DAU tahun sebelumnya, Namun formulasi DAU 2008 memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah menilai Provinsi Kepulauan Riau memiliki kapasitas fiskal yang baik mengingat sebagai provinsi penghasil migas. Realisasi penerimaan DAU periode Januari – Desember 2007 sebesar Rp333.332.994.000 atau 100% dari target yang ditetapkan.

GRAFIK 4.2 – PERKEMBANGAN TARGET DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2007 DAN RENCANA 2008



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah – Provinsi Kepulauan Riau

4.4.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan APBN pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan pembagian formulasi penghitungan kebutuhan sarana prasarana pemerintah daerah..

Estimasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAK) pada Tahun 2008 ditetapkan sebesar Rp5.801.000.000 dimana sebelumnya pada tahun 2007 tidak ada alokasi bagi provinsi Kepulauan Riau.

4.4.5. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana penerimaan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2008 diproyeksikan tidak ada alokasi bagi provinsi Kepulauan Riau. Komponen penerimaan ini merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah.

4.5. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2008

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dalam tahun 2008 meliputi :

1. Di Bidang Pajak Provinsi yang ditujukan untuk meningkatkan PAD;
2. Di Bidang Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan
3. Di Bidang Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar luas wilayah laut diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal, mengingat tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk dapat menjangkau pelayanan masyarakat.

Oleh karena itu program peningkatan penerimaan Pendapatan daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi akan dilaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peningkatan Penerimaan Daerah yang berasal dari sumber - sumber PAD dan Dana Perimbangan.

2. Meningkatkan sumber Penerimaan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak, serta mengupayakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang proporsional sebagaimana kedudukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penghasil SDA sektor Migas.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam hal menunaikan kewajibannya selaku wajib pajak.
4. Meningkatkan pengelolaan penerimaan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas

Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2008 merupakan program kerja jangka panjang yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi Penerimaan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut :

1. Intensifikasi Pajak dan Retribusi

Upaya Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui :

- a. Penyederhaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database kantor pelaksana dan pelayanan teknis ;
 - b. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan Penerimaan Daerah ;
 - c. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah ;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT dan PPT ;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Unit Satuan Kerja terkait dengan tujuan, agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat tercapai secara optimal ;
 - f. Pengembangan sistem informasi online Pendapatan Daerah.
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi
- Upaya Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui :
- a. Pengkajian jenis Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah ;
3. Peningkatan DBH Pajak dan Bukan Pajak dilakukan melalui :
- a. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait Pemerintah Pusat ;

- b. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

4.6. APBD KOTA BATAM

Pulau Batam yang merupakan bagian dari Propinsi Riau memiliki banyak nilai tambah. Dengan modal jalur pelayaran internasional serta jarak dengan negara Singapura hanya 12.5 mil laut atau sekitar 20 Km, maka untuk memacu perkembangan di wilayah nusantara dari semua aspek kehidupan, khususnya dibidang ekonomi, maka Pemerintah Indonesia mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB).

Dalam memandang masa depan Batam, tidak sejobyanya menyamaratakan Batam dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Potensi dan peluang-peluang yang ada tidak dapat dimanfaatkan jika dikelola hanya dengan pendekatan tradisional seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia. Para stakeholder di Batam dituntut agar mempunyai wawasan dan visi yang mampu membawa Batam ke masa depan dengan wacana Internasional. Atau dengan kata lain, tidak dapat dengan kebiasaan dan cara pikir yang hanya bersifat kedalam (*inward looking*). Dalam kancah persaingan internasional, tentunya cara berfikir dan wawasan kita minimal harus sebanding dengan masyarakat internasional. Selain itu pendirian kawasan industri yang berstandar internasional yang secara tepat didisain untuk mengakomodasi "clustery/ kelompok" industri pada suatu tempat berdasarkan keterkaitan dan efisiensi yang lebih besar. Alternatif clustery yang potensial dikembangkan adalah berdasarkan negara, misalnya kawasan industri Jepang, atau berdasarkan jenis industri yang saling terkait misalnya kawasan industri barang elektronik, dimana berkumpul industri IC, PCB, industri plastik, industri *packaging* dan industri-industri komponen yang terkait lainnya.

Pendirian pusat promosi ekspor dan investasi se-Sumatera di Batam akan menjadikan Batam sebagai pintu gerbang promosi produk-produk dan investasi se-Sumatera. Pusat ini dapat juga berfungsi sekaligus sebagai pusat perdagangan komoditi. Selanjutnya sesuai kebijaksanaan nasional dibidang telematika adalah menjadikan

Batam sebagai “Batam Intelligent Island”, dimana Batam dikembangkan sebagai kawasan percontohan untuk kegiatan yang berbasis Information Technology (IT), sehingga segala aktifitas dapat dikembangkan melalui komunikasi elektronik (e). Hal ini dapat dilakukan secara bertahap sehingga pada waktunya Batam dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya terhadap kawasan-kawasan serupa di masa depan. Perkembangan yang direncanakan antara lain :

- Meningkatkan pelayanan publik melalui IT atau yang dikenal e-Government
- Membangun IT training center
- Membangun aplikasi elektronik diberbagai bidang seperti e-Commerce, e-Tourism dan lainnya secara terintegrasi.

Saat ini Otorita Batam dengan dukungan pemerintah kota Batam serta beberapa instansi terkait sedang mengembangkan konsep “Batam Intelligent Island”. Dengan tersedianya informasi infrastruktur , maka Batam akan lebih kompetitif dalam menarik investor-investor berteknologi tinggi.

APBD Kota Batam untuk sub pendapatan tahun 2007 terdiri dari pos pendapatan sebesar Rp746,04 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp135 miliar. Target APBD Kota Batam tahun 2007 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2006 pos pendapatan Kota Batam sebesar Rp529,23 miliar dan pos pembiayaan sebesar Rp93,83 miliar.

Proyeksi APBD Batam 2008 hanya Rp682 miliar atau berkurang sekitar Rp214 miliar dari APBD 2007. Dalam Rancangan APBD Batam 2008, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp668,887 miliar.

Sedangkan belanja pemerintah dianggarkan sebesar Rp1,01 triliun. Belanja pegawai yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp440 miliar. Sementara belanja publik untuk belanja modal sekitar Rp277 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp263,7 miliar. Dengan berkurangnya APBD tahun 2008 dibandingkan tahun 2007, anggaran aparatur tersebut rencana akan dirasionalisasikan sekitar 30% hingga 40% dari pengajuan semula di Rancangan APBD 2008.

4.7. APBD KOTA TANJUNG PINANG

Jumlah alokasi APBD Kota Tanjung Pinang pada tahun 2007 mencapai Rp.150,26 juta dimana alokasi terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Rp.51,79 juta. Dengan jumlah angkatan kerja mencapai 76.547 orang, terdapat 7,8%

penduduk yang merupakan pengangguran dengan nilai IPM mencapai 72,7 dan menduduki posisi 79 dari Kab/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 kota Tanjungpinang mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan dengan APBD tahun 2007 sebesar Rp533 milyar menjadi Rp513,1 milyar atau turun sebesar Rp19,9 milyar (3,73%) Turunnya APBD 2008 disebabkan oleh berkurangnya alokasi beberapa anggaran pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan pemerintah pusat bagi kota Tanjungpinang. DAU yang sebelumnya dialokasikan pemerintah pusat pada tahun 2007 sebesar Rp206 milyar menjadi Rp188 milyar pada tahun 2008. Begitu juga halnya dengan DAK.

4.8. APBD KABUPATEN KARIMUN

APBD Kabupaten Karimun Tahun 2008 direncanakan mencapai Rp543,7 miliar. Atau meningkat 16,26 % dibandingkan target 2007 sebesar Rp535 milyar. Diantaranya terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang direncanakan sebesar Rp260,9 Miliar sedangkan Belanja Langsung Direncanakan sebesar Rp282,7 Miliar.

Adapun Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 direncanakan sebesar Rp434,2 Miliar. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimun yang ditargetkan sebesar Rp128 Miliar, Dana Perimbangan direncanakan mencapai Rp298.617.390.000, serta Dana Pendapatan lain yang sah ditargetkan sebesar Rp7.525.000.000.

Dengan rencana Pendapatan mencapai Rp434,2 Miliar, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp543,7 Miliar, maka terdapat selisih lebih sebesar Rp109,5 Miliar diambilkan dari Silva Anggaran berjalan Tahun 2007. Anggaran belanja daerah sebesar Rp543,7 Miliar tersebut untuk mempercepat Pembangunan terutama Pembangunan Insfrastruktur.

4.9. APBD KABUPATEN BINTAN

RAPBD Bintan tahun 2008 yang diusulkan terjadi penurunan (defisit) mencapai Rp158,8 milyar dibandingkan APBD 2007 sebesar Rp439 milyar menjadi Rp280 milyar. Sementara untuk pembiayaan daerah justru mengalami perubahan dari sisi penerimaan dan pengeluaran.

Dari sisi penerimaan melalui sisa lebih anggaran sebesar Rp121,8 Milyar lebih. Dari dana cadangan dan mencapai Rp42 Milyar serta penerimaan pembiayaan mencapai Rp163,8 Milyar. Sementara itu, untuk rancangan pengeluaran dalam RAPBD yang berjumlah Rp5 Milyar akan disalurkan untuk penyertaan modal pada PT Bank Riau sebesar Rp3 Milyar sedang sisanya Rp2 Milyar disalurkan pada BUMD dan BPR yang masing-masing menerima Rp1 Milyar.

Rancangan APBD tahun 2008 ini kesemuanya untuk biaya percepatan pembangunan ibukota Kabupaten Bintan di Bintan Buyu. Selanjutnya untuk penanggulangan kemiskinan serta pementapan kinerja Pemerintah daerah Bintan.

TABEL 4.3 – PERKEMBANGAN APBD DAN REALISASI PAD KABUPATEN BINTAN

(miliar rupiah)

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Realisasi PAD	54	59	65,5	87,7	100,3
2	APBD	355	276	470,6	439	280

RAPBD meliputi perencanaan untuk pendapatan daerah sebesar Rp359,5 Milyar lebih. Dari rencana pendapatan daerah ini, didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar sekitar Rp100,3 milyar meningkat 14,36% dibandingkan tahun 2007 sebesar 87,7 milyar. Sedangkan penerimaan dari dana perimbangan sekitar Rp238,4 milyar dari pendapatan lain-lainya yang sah sebesar Rp20,7 milyar. Untuk belanja daerah tahun 2008, sesuai perencanaan mencapai Rp518,3 milyar yang terdiri dari belanja tidak langsung mencapai Rp207,5 milyar dan belanja langsung berkisar Rp310,8 milyar. Pada tahun anggaran 2008 mendatang ini APBD Kabupaten Bintan pada tahun 2008 direncanakan sebesar Rp280 milyar.

4.10. APBD KABUPATEN LINGGA

Pembentukan Kabupaten Lingga adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor:31 tanggal 18 Desember 2003. Luas wilayah Kabupaten Lingga yang mencapai 211.772 km² terdiri dari 377 buah pulau, dimana 92 buah pulau yang sudah berpenghuni dan sisanya merupakan pulau yang belum berpenghuni. Jumlah penduduk Kabupaten Lingga adalah 84.254 jiwa dan memiliki PDRB sebesar Rp.257,69 miliar. Pendapatan perkapita penduduk di wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur mencapai Rp.7,4 juta/jiwa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga tahun 2008 tinggal Rp335 miliar. Angka ini berkurang sebesar Rp65 miliar dibanding APBD tahun 2007 yang besarnya mencapai Rp400 miliar. Agar penggunaan APBD sebesar Rp335 miliar tepat sasaran, maka Pemkab Lingga sedang melakukan verifikasi program kerja untuk menentukan skala prioritas. Hal itu dilakukan agar apa yang dikerjakan nantinya benar-benar menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat.

Pembangunan jalan tembus antar daerah, membangun jembatan, dan dermaga rakyat termasuk dalam kategori yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Karena infrastruktur akan membuka isolasi daerah dan dapat memperlancar hubungan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai keperluan. Dengan demikian APBD yang jumlahnya lebih kecil dari tahun lalu diharapkan benar-benar efektif untuk menyentuh pelayanan umum kepada masyarakat. Terobosan ini sekaligus untuk mencapai sasaran program Kementian PPDT dalam mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

4.11. APBD KABUPATEN NATUNA

Dalam tahun anggaran 2008 nanti, jumlah APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) nyaris semua daerah provinsi, kabupaten, dan kota akan berkurang. Namun, barangkali hanya di Kabupaten Natuna yang jumlahnya menyusut drastis hingga hanya tinggal sekitar 45 persen dari jumlah tahun anggaran 2007. Pada tahun anggaran 2007 jumlah APBD Kabupaten Natuna sekitar Rp1,7 triliun, sedangkan di tahun anggaran 2008 hanya berjumlah sekitar Rp817,54 miliar.

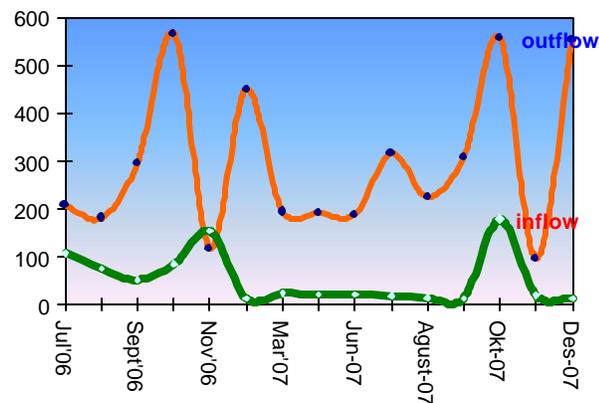
Salah satu penyebab turunnya jumlah APBD Kabupaten Natuna tersebut disebabkan kebijakan pusat yang mengurangi ketergantungan daerah sesuai UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada hilangnya penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Sebab, Natuna ditetapkan sebagai daerah penghasil, dan sebagai pengganti DAU, Kabupaten Natuna mendapatkan dana penyeimbang DAU yang jumlahnya sekitar Rp39 miliar. Padahal, pada anggaran 2007 Natuna mendapatkan DAU sekitar Rp159 miliar.

BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5.1. PENGEDARAN UANG KARTAL

Perkembangan aliran uang yang masuk (*inflow*) dan keluar (*outflow*) di wilayah kerja Bank Indonesia Batam secara nominal menunjukkan *outflow* yang lebih besar daripada *inflow*. Pada bulan Oktober 2007, terjadi *outflow* sebesar Rp558,22 miliar sedangkan *inflow* sebesar Rp178,86 sehingga terjadi *net outflow* 379,36. Aliran uang masuk ke Kantor Bank Indonesia Batam pada bulan Oktober meningkat cukup tinggi terkait dengan kebutuhan masyarakat yang melakukan penukaran pecahan uang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Untuk bulan November 2007, terjadi *outflow* sebesar Rp95,66 miliar dan *inflow* sebesar Rp20,97 miliar, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp74,69. Sedangkan pada Desember 2007, *outflow* mencapai Rp554,29 miliar, sementara *inflow* sebesar Rp14,28 miliar, sehingga terjadi *net outflow* sebesar Rp540,01 miliar. Secara rata-rata selama tiga bulan tercatat *outflow* Rp402,67 miliar, sedangkan rata-rata *inflow* Rp70,67 miliar.

GRAFIK 5.1 - PERKEMBANGAN INFLOW/OUTFLOW KBI BATAM



Sumber : Bank Indonesia Batam

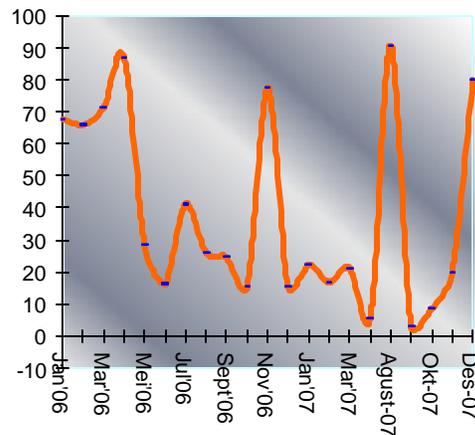
5.1.1. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Peracikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan uang bersih (*clean money policy*) yaitu Bank Indonesia senantiasa menyediakan uang rupiah dalam kondisi yang layak kepada masyarakat. Kegiatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dilakukan dengan cara memusnahkan uang yang tidak layak edar dan menggantinya dengan uang yang layak

edar. Di samping itu, Bank Indonesia juga memberikan pelayanan kepada perbankan dan masyarakat untuk kegiatan setoran, penarikan dan penukaran untuk pecahan besar ke pecahan kecil serta untuk uang rupiah lusuh.

Selama triwulan akhir 2007, jumlah UTLE yang diracik di KBI Batam Rp108,25 miliar. Selama tiga bulan akhir tahun 2007 jumlah UTLE yang diracik di KBI Batam mengalami trend peningkatan. Pada bulan Oktober 2007 UTLE yang diracik tercatat sebesar Rp8,71 miliar, kemudian jumlah tersebut meningkat di bulan berikutnya sebesar Rp19,67 miliar. Pada bulan Desember 2007 jumlah UTLE yang diracik oleh KBI Batam tercatat sebesar Rp79,87 miliar.

GRAFIK 5.2 - PERKEMBANGAN PTTB



Sumber: Bank Indonesia Batam

5.2. LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

5.2.1. Kliring Lokal

Untuk wilayah kerja KBI Batam, terdapat 3 (tiga) wilayah kliring lokal, yaitu: di KBI Batam untuk wilayah Kota Batam, PT. Bank Mandiri untuk wilayah Tanjung Pinang, dan PT. BNI untuk wilayah Tanjung Balai Karimun.

Nilai transaksi melalui sistem kliring lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2007 mencapai Rp2,65 triliun dengan jumlah warkat sebanyak 103.390 lembar. Nilai total kliring tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,59 triliun dengan jumlah warkat sebanyak 114.647 lembar. Sementara itu dari rata-rata harian perputaran kliring meningkat secara nominal menjadi sebesar Rp44,22 miliar terhadap triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp43,19 miliar. Sedangkan dari jumlah warkat, rata-rata harian perputaran kliring mengalami penurunan menjadi 1.723 lembar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1.911 lembar. Sementara itu, penolakan Cek/BG kosong di wilayah kerja KBI Batam tercatat sebesar Rp93,26 triliun dengan jumlah warkat sebanyak 1.655 lembar meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp29,27 triliun dengan jumlah warkat sebanyak 1.474 lembar.

TABEL 5.1 – PERKEMBANGAN KLIRING LOKAL

(miliar rupiah)

Keterangan	2006	2007			
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Perputaran Kliring					
- Lembar	103.808	104.613	108.413	114.647	103.390
- Nominal (juta Rp)	2.437.397	2.297.292	2.267.885	2.591.823	2.653.295
Rata-rata Harian Perputaran Kliring					
- Lembar	1.759	1.687	1.109	1.911	1.723
- Nominal (juta Rp)	41.312	37.053	22.355	43.197	44.222
Penolakan Cek/BG Kosong					
- Lembar	1.623	1.449	1.395	1.474	1.665
- Nominal (juta Rp)	33.611	33.885	120.547	29.269	93.261

Sumber : Bank Indonesia Batam

Terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan kliring, maka Bank Indonesia menargetkan pengimplementasian Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2007. Hal ini dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai yang cepat, aman, handal, dan efisien. Aplikasi SKNBI pertama kali diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005, dimana sampai akhir tahun 2005 seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah diimplementasikan SKNBI.

5.2.2. Transaksi BI-RTGS

Transaksi masyarakat melalui sarana Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Kantor Bank Indonesia Batam pada triwulan akhir tahun 2007 mengalami peningkatan baik pada transaksi masuk namun mengalami penurunan untuk transaksi keluar baik secara nominal maupun dari volume transaksi. Transaksi yang masuk ke perbankan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar Rp689 miliar (13,26%) menjadi sebesar Rp5,89 triliun pada triwulan IV 2007 dengan volume sebanyak 8.757 transaksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5,2 triliun dengan volume 8.113 transaksi. Sementara itu untuk transaksi keluar perbankan di wilayah kerja KBI Batam mengalami penurunan sebesar Rp389 miliar (8,97%) menjadi

sebesar Rp3,98 triliun pada triwulan IV 2007 dengan volume sebanyak 6.650 transaksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,37 triliun dengan volume 7.518 transaksi.

TABEL 5.2 – PERKEMBANGAN BI-RTGS

Keterangan	2006		2007			Pert. (q-t-q)	
	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Nom.	%
Transaksi Masuk							
Nominal (miliar Rp)	5.202	3.724	4.090	5.200	5.889	689	13,26%
Volume	6.427	6.865	6.668	8.113	8.757	644	7,94%
Transaksi Keluar							
Nominal (miliar Rp)	4.056	3.183	3.376	4.367	3.978	-389	-8,91%
Volume	5.995	5.753	6.090	7.518	6.650	-868	-11,55%

Sumber : Bank Indonesia Batam

Penerapan sistem BI-RTGS di Indonesia dimulai sejak tanggal 17 November 2000, dimana sistem BI-RTGS dinilai sangat penting mengingat transaksi pembayaran bernilai besar (*High Value Payment System – HPVS*) yang memiliki potensi terjadinya resiko sistemik sebelum adanya sistem BI-RTGS menempati bagian mayoritas (hampir 2/3) dari seluruh transaksi pembayaran. Adapun implementasi sistem BI-RTGS di KBI Batam mulai dilaksanakan sejak 23 November 2001 bersamaan dengan KBI Pekanbaru.

5.3. UANG PALSU

Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan ke Bank Indonesia Batam pada triwulan IV 2007 berjumlah Rp210.000,00 dengan jumlah sebanyak 5 lembar. Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan nominal sebesar Rp460.000,00 dengan jumlah lembar menurun sebanyak 9 lembar.

Berdasarkan jenis pecahan, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 dilaporkan sebanyak 1 lembar, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 dilaporkan sebanyak 1 lembar, uang kertas rupiah palsu pecahan Rp20.000,00 dilaporkan sebanyak 3 lembar.

Terkait dengan uang palsu yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia Batam terus melakukan berbagai upaya untuk menekan peredarannya, antara lain dengan melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada berbagai kalangan (perbankan, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum).

BAB 6 PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN KESEJAHTERAAN

6.1. KONDISI UMUM

Jumlah pencari kerja berdasarkan jenjang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2007 mengalami peningkatan. Namun, kondisi pengangguran serta ekspektasi masyarakat terhadap kondisi pengangguran belum menunjukkan perbaikan. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok selama periode triwulan laporan berdampak pada meningkatnya angka kebutuhan hidup minimum (KHM). Dengan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang relatif stabil, menyebabkan beban masyarakat yang berpenghasilan setara ataupun dibawah UMP semakin berat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

6.2 PERKEMBANGAN PENDUDUK¹

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan Agustus 2007 jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.408.125 jiwa, dimana sebagian besar penduduk terdapat di Kota Batam (51,83%), Kabupaten Karimun (14,80%), dan Kota Tanjung Pinang (12,26%).

TABEL 6.1 – JUMLAH PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Persentase
1. Batam	729.908	51,83
2. Karimun	208.400	14,80
3. Tanjung Pinang	172.616	12,26
4. Bintan	121.303	8,61
5. Natuna	93.644	6,65
6. Lingga	84.254	5,98
Total	1.408.125	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan (data diolah)

Kota Batam yang menempati urutan teratas berdasarkan jumlah penduduk disebabkan karena sebagian besar aktivitas perekonomian Kepri berlangsung di kota ini, dimana sektor industri dan perdagangan berperan penting dalam perekonomian kota ini.

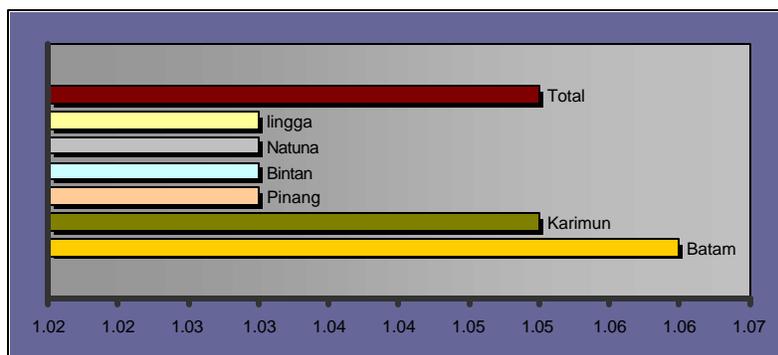
¹ berdasarkan definisi BPS yang dimaksud penduduk adalah *all residents in the entire geographical territory of the RI who have stayed for 6 months or longer and those who intend to stay even though their length of stay were less than 6 months*

Kedua sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi yang dominan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan proporsi penduduk Batam menjadi lebih heterogen dari Kabupaten/Kota lainnya baik dari sisi agama maupun dari suku bangsa.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000, dapat dilihat bahwa persentase terbesar suku bangsa yang menghuni Kota Batam adalah suku Jawa (26,69%) diikuti oleh suku Melayu (20,90%) dan suku Batak (14,92%). Sebaran dan kepadatan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan skala pembangunan saja, akan tetapi skala kegiatan pemerintahan juga berpengaruh. Perkiraan ini terkait dengan ketersediaan fasilitas bagi penduduk seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan dan sebagainya. Dari hasil sensus tersebut juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Batam sebagian besar berada pada usia produktif (antara 15-64 tahun) yaitu sebesar 76,76% sedangkan untuk usia 15 tahun ke bawah sebesar 22,58% dan untuk usia 65 tahun keatas sebesar 0,66%.

Sementara itu, jumlah penduduk di Kota Tanjung Pinang berada di urutan ketiga setelah Tanjung Balai Karimun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sektor ekonomi yang berkembang di daerah tersebut, dimana sebagian besar penduduk Kabuapten Karimun bekerja di sektor pertanian yang dikelompokkan dalam 5 sub sektor yaitu: tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Namun demikian sub sektor perikanan merupakan sektor yang paling signifikan dibanding sub sektor lainnya. Sementara sektor pertambangan di daerah Karimun menghasilkan 3 (tiga) bahan tambang/galian utama, yaitu pertambangan timah, granit dan penggalan pasir.

GRAFIK 6.1 – LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005-2007



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat setiap tahunnya, dimana tingkat pertumbuhan pada tahun 2007 terhadap tahun 2006 mencapai 1,05 kali, dengan pertumbuhan terbesar terdapat di Kota Batam.

6.3. KESEJAHTERAAN DAERAH

Tujuan akhir suatu kebijakan ekonomi makro adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat diukur melalui pendapatan per kapita penduduk dengan cara membandingkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah penduduk suatu periode tertentu. Sementara untuk daerah, indikator yang digunakan adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Biasanya indikator ini digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat kemakmuran sosial ekonomi penduduk, akan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan karena pada dasarnya pemilik pendapatan tersebut adalah penduduk yang memiliki faktor produksi.

**TABEL 6.2 – PENDAPATAN PER-KAPITA PENDUDUK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TW.III & TW.IV-2007**

Rincian	Triwulan III 2007		Triwulan IV 2007	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
PDRB (dalam jutaan)	Rp 13.185.448,86	Rp8.744.419,57	Rp13.930.916,03	Rp9.079.640,47
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	1.408.125 jiwa			
Pendapatan Per-Kapita	Rp9.363.634,08	Rp6.209.573,95	Rp9.893.238,17	Rp6.448.035,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, data Diolah

Berdasarkan tabel 1.4, terlihat bahwa pendapatan per-kapita penduduk triwulan IV 2007 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp9.893.238,17, naik 5,65 % dibandingkan triwulan III 2007 sebesar Rp9.363.634,08. Sedangkan atas dasar harga konstan 2000, pendapatan per-kapita Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp6.448.035,84 atau meningkat 3,84% dibanding triwulan sebelumnya sebesar Rp6.209.573,95. Meskipun tidak bisa menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, namun *proxi* ini memberi indikasi meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum.

Keadaan ini tercermin dari peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Riau sebesar 3,40 % dari Rp805.600 pada tahun 2006 menjadi Rp833.000 pada tahun

2008. Sedangkan tingkat Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam tahun 2007 naik sebesar Rp45.000 (5,52%) menjadi Rp860.000 dibandingkan tahun 2006 yang ditetapkan sebesar Rp815.000,00.

BAB 7 PROSPEK EKONOMI DAN INFLASI

7.1. PROSPEK EKONOMI

Prospek pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2008 diperkirakan akan tumbuh moderat dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski sepanjang tahun 2007 berbagai indikator ekonomi menunjukkan kecenderungan positif, dampak perlambatan ekonomi global akibat harga minyak, kendala suplai tenaga listrik serta berbagai isue regional seperti kenaikan UMK, penyesuaian tarif air bersih (ATB) dan peningkatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diduga dapat menahan laju pertumbuhan di awal triwulan tahun 2008.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau memasuki tahun 2008 diproyeksi akan didorong oleh konsumsi dan investasi. Kenaikan upah minimum karyawan di satu sisi akan memberatkan beban pengusaha serta mengurangi potensi keuntungan perusahaan, namun di sisi lain mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Rendahnya tingkat penyelesaian proyek-proyek pemerintah di tahun 2007 akan lebih diintensifkan pengerjaannya di triwulan I 2008. Di samping itu adanya proyek *multi-years* seperti pembangunan pulau Dompok sebagai pusat pemerintahan provinsi Kepulauan Riau akan meningkatkan porsi belanja pemerintah dan memberikan *multiplier effect* pada perekonomian daerah.

Sepanjang tahun 2007, perkembangan investasi di wilayah Kepulauan Riau mulai menunjukkan tren positif. Implementasi FTZ yang tertunda diharapkan belum kehilangan momentum, sehingga mampu menjadi *trigger* bangkitnya investasi swasta domestik dan asing di provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan investasi sejalan dengan realisasi FTZ diperkirakan akan memecah kekakuan sisi penawaran (*supply side rigidity*) dalam merespon stimulus perekonomian.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2008 diproyeksi akan didorong oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Penguatan indikator perbankan dan *booming* industri properti selama tahun 2007 diperkirakan tetap berlanjut di triwulan I 2008 sebagai imbas meningkatnya aktivitas perekonomian. Sebaliknya, gejolak harga minyak, perlambatan ekonomi global serta

terganggunya suplai tenaga listrik akan memperlambat pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Namun demikian, pertumbuhan triwulan I 2008 diperkirakan masih akan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2007.

Dampak langsung dari isu perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia, krisis sub-prime mortgage yang masih berlanjut serta kekhawatiran akan adanya resesi di Amerika diperkirakan tidak signifikan mempengaruhi perekonomian Kepulauan Riau di triwulan I 2008, terutama pada kinerja ekspor dan investasi di Kepulauan Riau.

Prediksi ini didasarkan pada perkembangan investasi dan kinerja ekspor sepanjang tahun 2007 yang menunjukkan peningkatan. Investasi yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau dan telah disetujui aplikasinya selama Januari-Desember 2007 terdapat 79 proyek baru dan 4 aplikasi perluasan usaha PMA dengan nilai investasi mencapai US\$ 298.864.665 atau meningkat 56% dibandingkan tahun 2006. Sedangkan total ekspor non-migas termasuk dari kawasan berikat di wilayah kerja Batam selama periode Jan-Nov 2007 senilai US\$ 6,36 milyar atau meningkat 12,92% dibandingkan tahun 2006.

Berdasarkan pemetaan ekspor yang dilakukan berdasarkan negara tujuan, share ekspor ke Amerika memegang peranan kecil terhadap total ekspor Kepulauan Riau. Disamping itu, laju pertumbuhan ekspor ke Amerika mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, sehingga diperkirakan tidak terlalu mempengaruhi kinerja ekspor secara keseluruhan.

Share Ekspor Negara Tujuan Terbesar						Laju Pertumbuhan Ekspor					
NEGARA	2003	2004	2005	2006	2007	NEGARA	2003	2004	2005	2006	2007
Singapore	-2.57%	18.30%	15.57%	-5.25%	6.09%	Singapore	62.73%	68.30%	69.92%	66.64%	62.61%
America	15.50%	-21.70%	12.57%	32.71%	-1.80%	America	7.08%	5.10%	5.09%	6.79%	5.91%
Europe	-0.79%	-0.65%	-18.53%	21.52%	23.98%	Europe	6.58%	6.02%	4.34%	5.31%	5.83%
Japan	34.30%	-1.03%	6.92%	-26.03%	-0.40%	Japan	9.19%	8.37%	7.93%	5.90%	5.20%
Australia	-60.70%	-20.80%	24.80%	238.00%	139.74%	Australia	0.88%	0.64%	0.71%	2.41%	5.13%
China	24.30%	13.57%	28.72%	54.94%	121.50%	China	1.31%	1.37%	1.56%	2.43%	4.77%
Other Asia	40.64%	-5.84%	118.38%	52.45%	24.79%	Other Asia	0.85%	0.74%	1.42%	2.18%	2.41%
France	-15.07%	20.45%	-22.16%	57.12%	35.23%	France	1.35%	1.50%	1.04%	1.64%	1.96%
Hongkong	62.98%	-11.88%	2.05%	32.59%	17.87%	Hongkong	1.68%	1.37%	1.23%	1.65%	1.72%
Netherland	17.04%	-18.34%	-19.56%	49.78%	15.63%	Netherland	1.86%	1.40%	1.00%	1.50%	1.54%

Sumber : DSM-BI (data diolah)

Namun, dampak tidak langsung berupa turunnya permintaan Amerika sebagai negara dengan konsumsi terbesar dunia akan menyebabkan turunnya ekspor negara-

negara besar pemilik lisensi antara lain Jepang, Cina, Singapore, dan Eropa, sehingga akan berakibat pada turunnya permintaan ke perusahaan-perusahaan di Batam sebagai tempat *manufacturing* produk-produk yang dijual oleh negara tersebut.

Adanya kenaikan permintaan di negara berkembang terutama Asia sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut yakni sebesar 6,9% (IMF) yang didorong oleh pesatnya perekonomian Cina dan India, dapat dijadikan alternatif strategi guna mengalihkan ekspor Kepulauan Riau dari negara-negara maju yang lebih terkena dampak resesi Amerika ke negara-negara Asia yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi. Dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi pasar ekspor ke China dan India serta negara berkembang Asia yang memiliki tingkat permintaan lebih tinggi, kinerja ekspor provinsi Kepulauan Riau diharapkan tidak menurun di tahun 2008.

7.2. PROSPEK INFLASI

Memperhatikan kecenderungan pergerakan indikator ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta berdasarkan pemantauan pada hal-hal yang dapat memberikan pengaruh bagi pergerakan dimaksud seperti dampak musiman, pengaruh alam, agenda demokrasi dan perubahan kebijakan, serta perkembangan terkini mengenai perekonomian dunia sampai dengan triwulan V 2007, prospek inflasi pada periode triwulan I 2008 diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat.

Inflasi yang relatif terjaga pada tahun 2007 diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2008. Dari sisi makroekonomi, nilai tukar rupiah yang masih relatif stabil dan berkurangnya akses likuiditas perbankan berpengaruh positif terhadap angka inflasi agar tetap kondusif. Dari sisi fiskal otoritas fiskal akan terus berupaya memantapkan ketahanan fiskal ditengah gejolak harga minyak dan ketidakpastian perekonomian global.

Sebaliknya faktor musim yang pada triwulan awal tahun 2008 yang masih merupakan musim penghujan akan berdampak pada distribusi bahan makanan ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan daerah perairan sehingga akan berpengaruh pada kelancaran distribusi bahan makanan tersebut. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk harga-harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lain yang dipasok ke Kota Batam mempunyai potensi untuk mengalami tekanan pada triwulan awal tahun 2008.

Selain itu, terkait dengan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada awal Februari juga akan ikut mempengaruhi pola belanja masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, mengingat jumlah penduduk dari suku bangsa Tionghoa cukup besar. Pola belanja yang meningkat ini

akan mempengaruhi permintaan kebutuhan pokok, khususnya yang terkait dengan perayaan tahun baru tersebut. Peningkatan permintaan juga akan berpengaruh pada laju inflasi di Provinsi Kepulauan Riau yang diukur dari Kota Batam.

Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi global di awal tahun diperkirakan masih diwarnai tekanan akibat kenaikan harga minyak dan dampak *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang masih berlanjut juga berpotensi untuk memberikan tekanan pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia yang dapat mempengaruhi laju inflasi di daerah.

Di sisi regional, beberapa kebijakan pemerintah daerah seperti penyesuaian UMK, tarif air minum (ATB) dan peningkatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di awal tahun 2008 diprediksi akan ikut memberikan kontribusi terhadap inflasi di Provinsi Kepulauan Riau terutama inflasi *administred price*.

Laju inflasi tahunan (y-o-y) Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2007 diperkirakan akan mengalami peningkatan meskipun tetap lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Trend perkembangan inflasi kota Batam dari awal tahun 2005 sampai dengan triwulan III 2007 selalu berada di bawah inflasi nasional. Perkembangan inflasi kota Batam yang selalu berada di bawah inflasi nasional salah satunya dipengaruhi oleh biaya hidup yang sudah cukup tinggi di Batam, sehingga kenaikan harga relatif tertekan.